



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BUKU PINTAR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2020



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Brigjen Katamsa Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: dislutkan.kalteng.go.id Email: dislutkan@kalteng.go.id

BUKU PINTAR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2020

Pengarah

Ir. H. Darliansjah, M.Si.

Penulis/ Penyusun

Nyoman Mugre, S.Pi., M.Si.

Sugeng Kaspani, S.Pi., MT.

Dewi I. Handayani, S.Pi., M.Si.

Rahmadi, S.Pi.

Frans C. Lampe, S.Pi.

Restuah, S.Pi.

David Hariyanto, S.Pi.

Roy Marlo Y. Berkat, S.St.Pi.

Dimas Singgih S.A., S.St.Pi.

Maragusfer M. S.St.Pi.

Dwi Jatmiko Utomo, A.Md.

Elyta Vivi Yanti, S.Pi.

Editor

Nyoman Mugre, S.Pi., M.Si

Aditya Rakhman, ST.

Elyta Vivi Yanti, S.Pi.

Desain

Nyoman Mugre, S.Pi., M.Si.

Aditya Rakhman, ST.

Diterbitkan oleh:

Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya 73112

Telepon (0536) 3229663 Fax. (0536) 3220517



H. SUGIARTO SABRAN
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Executive Summary

Kalimantan Tengah memiliki 7 (tujuh) kabupaten yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa, mulai dari Kabupaten Sukamara di barat hingga Kabupaten Kapuas di timur dengan panjang garis pantai \pm 750 km dan potensi laut Kalimantan Tengah sebesar 94.500 km², sedangkan luas hutan mangrove 30.497,71 Ha, terumbu karang 6.492,1 Ha dan padang lamun 11.179,02 Ha serta memiliki berbagai jenis ikan pelagis, udang, rajungan, dan lainnya. Kalimantan Tengah juga memiliki potensi perikanan perairan umum dengan luas \pm 2,29 juta yang terdiri dari 11 sungai besar dengan 33 sungai kecil yang bermula dari utara dan mengalir ke Laut Jawa, Kalimantan Tengah juga memiliki 26 rawa dan 555 danau yang menjadi salah satu daerah penangkapan ikan air tawar serta sebagai kawasan budidaya ikan yang tersebar hampir di sebagian besar kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Tengah.

Besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Berbagai program yang dilaksanakan selama tahun 2016-2019 meliputi: 1). Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap; 2). Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya; 3). Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan; 4). Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir; dan 5). Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Produksi perikanan Kalimantan Tengah baik dari usaha penangkapan ikan dan usaha budidaya ikan sejak tahun 2016 terus mengalami peningkatan dimana pada akhir tahun 2019 produksi perikanan menjadi 251.583,70 ton terjadi peningkatan sebesar 64.369,02 ton atau sebesar 21,24 %. Dari jumlah keseluruhan produksi perikanan Kalimantan Tengah selama periode 2016 – 2019 produksi perikanan tangkap masih memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 57,70%, sedangkan produksi perikanan budidaya memberi kontribusi sebesar 42,30%. Sedangkan untuk laju pertumbuhan produksi perikanan Kalimantan Tengah selama tahun 2016 – 2019 sebesar 7,42 % per tahun. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kalimantan Tengah selama periode 4 (empat) tahun terakhir (2016-2019) mengalami peningkatan rata-rata per tahun 1,61%. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah pada tahun 2016-2017 mencapai 46,96 kg/kap/tahun, dan pada tahun 2018 angka konsumsi ikan mengalami peningkatan yang cukup baik menjadi 49,3 kg/Kap/Tahun selanjutnya tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebesar 53,3 kg/kap/Tahun. Sedangkan untuk tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kalimantan Tengah terus mengalami perbaikan setiap tahunnya. Dalam Penegakan hukum terhadap tindakan pidana kelautan dan perikanan selama periode tahun 2016-2019 jumlah penyelesaian kasus tindakan pidana kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah sebanyak 54 kasus. Kasus tindakan pidana kelautan dan perikanan yang telah diselesaikan di Kalimantan Tengah masih didominasi kasus *illegal fishing* di perairan laut dan darat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat konsen untuk menjaga sumber daya ikan maupun sumber daya perairannya agar tidak mengalami kerusakan dan kepunahan hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/543/2018 Tahun 2018 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2019 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Gosong Sanggora, Gosong Sepagar, Gosong Beras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang serta perairan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas keseluruhan 61.362,24 Ha. Dalam menjaga ekosistem hutan mangrove di wilayah pesisir Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah terus melakukan rehabilitasi kawasan dengan cara melakukan penanaman mangrove, sampai dengan tahun 2019 luasan kawasan yang di rehabilitasi melalui penanaman bibit mangrove seluas 4 ha dengan jumlah bibit 41.386 pohon dengan jenis *Rhisophora Mucronata*, di Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 18.035 pohon dengan luas 2 ha dan di Desa Ujung Pandaran Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 23.351 pohon dengan luasan ± 2 ha

Sejak dilakukan penyerahan aset pelabuhan perikanan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkomitmen melakukan pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan salah satunya dengan peningkatan kelas Pelabuhan Perikanan Kumai menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 38/KEPMEN-KP/2019 tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai. Seiring peningkatan kelas pelabuhan perikanan juga dilakukan peningkatan fasilitas pelabuhan dari semula berkonstruksi kayu menjadi konstruksi beton dengan total luas dermaga yang dibangun seluas 2.247,79 m². Kapasitas tambat kapal nelayan juga ditingkatkan dari semula hanya 8 unit kapal dengan akumulasi tonase 60 *Gross Tonnage* dan pada akhir tahun 2019 kapasitas tambat pelabuhan meningkat menjadi 40 unit kapal dengan akumulasi tonase 300 *Gross Tonnage*, Kapasitas *coldstorage* Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai juga ditingkatkan dari kapasitas semula 20 ton telah ditingkatkan menjadi 100 ton.

Perkembangan Rumah Tangga Perikanan (RTP) di Kalimantan Tengah selama periode tahun 2016-2019 mengalami pertambahan sebanyak 17.497 RTP sehingga sampai dengan tahun 2019 jumlah RTP (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan) menjadi sebanyak 62.739 RTP. Pada tahun 2017 peningkatan jumlah RTP hanya sebanyak 596 RTP atau meningkat sebesar 1,32%, peningkatan tertinggi jumlah RTP terjadi pada tahun 2018 sebanyak 9.545 RTP atau sebesar 20,82% dan pada tahun 2019 penambahan jumlah RTP hanya 7.357 RTP atau sebesar 13,28%. Sedangkan rata-rata pertambahan RTP di Kalimantan Tengah selama tahun 2016-2019 adalah sebesar 11,81%. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, selama 4 (empat) tahun terakhir peningkatan jumlah kelompok sebanyak 80 kelompok atau 57,17%, bila di rata-rata peningkatan jumlah kelompok per tahun mencapai 10,04%.

Dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Provinsi Kalimantan Tengah telah menyelesaikan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039. Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan inovasi daerah berupa aplikasi digital Geoportal "Laut Berkah" yang berbasis spasial. Geoportal "Laut Berkah" merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk menjawab tantangan pembangunan kelautan dan perikanan di era digital. Pada Era Digital menuntut informasi bisa diakses secara lebih cepat melalui *online* dan *mobile*. Geoportal "Laut Berkah" memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang disediakan melalui komputer dan telepon genggam. Aplikasi Geoportal "Laut Berkah" dapat di akses melalui *web* <https://geoportal-lautberkah.kalteng.go.id>. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga berkomitmen untuk memberi perlindungan keselamatan nelayan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2019, tentang Perlindungan Keselamatan Nelayan. Implementasi dari Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2019 pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program Kartu **Asuransi Nelayan Berkah**, memberikan jaminan kepada 9.000 orang nelayan di 14

kabupaten/kota se-Kalteng baik nelayan di perairan laut dan perairan umum. Program SeHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah) Nelayan di Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2019 sebanyak 580 persil yang tersebar di 4 (empat) Kabupaten.

Sebagai akselerasi percepatan pembangunan kelautan dan perikanan dan pemberdayaan pelaku usaha selama 4 (empat) tahun terakhir (2016-2019) telah memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan kepada kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan berupa bantuan pembuatan kolam budidaya ikan, bantuan sarana dan prasarana budidaya sistem bioflok, bantuan benih dan pakan ikan, bantuan mesin pakan ikan skala mini, bantuan budidaya keramba ikan, bantuan kelotok lengkap alat penangkapan ikan bagi nelayan perairan umum daratan, bantuan alat tangkap gillnet dan alat tangkap jaring cekar untuk nelayan wilayah pesisir, bantuan kapal pengangkut ikan, serta bantuan sarana dan prasarana Unit Pengolahan Ikan (UPI), dengan total Nilai bantuan yang diberikan adalah senilai Rp6.688.164.789,- kepada 84 kelompok usaha perikanan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Buku Pintar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat diselesaikan. Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk menyajikan data dan informasi kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah untuk seluruh masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder Dinas Kelautan dan Perikanan.

Ketersediaan data dan informasi kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah yang akurat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah yang tepat pada masa yang akan datang.

Harapan semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi para pihak yang berkepentingan dengan kebijakan sektor kelautan dan perikanan. Kami menyadari buku ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan dijadikan bahan masukan yang sangat berharga dalam meningkatkan kualitas penyempurnaan buku ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi baik tenaga maupun pikirannya sehingga Buku Pintar Dinas kelautan dan perikanan ini dapat tersusun dan diterbitkan.

Palangka Raya, Agustus 2020

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si

SAKAPUR SIRIH
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, atas capaian-capaian Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan untuk mewujudkan Kalimantan Tengah semakin BERKAH.

Saya selaku Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah bekerja keras, ikhlas, dan tuntas, juga telah melakukan inisiasi dan inovasi menyajikan data perkembangan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Tengah selama tahun 2016-2019.

Ketersediaan data dan informasi yang akurat serta akuntabel menjadi hal penting dan utama dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan termasuk dalam merencanakan pembangunan bidang kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah pada tahun-tahun mendatang.

Harapan semoga buku ini dapat memberi manfaat dan menjadi salah satu referensi bagi para pihak yang berkepentingan dengan kebijakan sektor kelautan dan perikanan khususnya di Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Agustus 2020
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,,

H. SUGIANTO SABRAN

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	i
KATA PENGANTAR	iv
SEKAPUR SIRIH	v
DAFTAR ISI	vi
I GAMBARAN UMUM	1
II TARGET DAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	3
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD	5
1. Produksi Perikanan Kalimantan Tengah 2016-2019	5
2. Produksi Perikanan Tangkap 2016 -2019	6
3. Produksi Perikanan Budidaya 2016 -2019	8
4. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	9
5. Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Masyarakat	10
6. Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (%)	11
7. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (Kasus)	12
8. Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan	13
9. Kawasan Pesisir yang di Rehabilitasi	15
B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM RENSTRA DAN RENJA	17
1. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut	17
2. Prasarana Pelabuhan Perikanan	19
3. Sertifikasi Tanah Nelayan	23
4. Perkembangan Rumah Tangga Perikanan (RTP)	23
5. Perkembangan Pokmaswas	27
III INOVASI DAERAH	29
1. Geoportal Laut Berkah	29
2. Asuransi Nelayan Berkah	30
IV FASILITASI PERIZINAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	32
V BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN	35

I. GAMBARAN UMUM

Kalimantan Tengah memiliki 7 (tujuh) kabupaten yang berhadapan langsung dengan laut jawa, mulai dari Kabupaten Sukamara di barat hingga Kabupaten Kapuas di timur dengan panjang garis pantai \pm 750 km dan potensi laut Kalimantan Tengah sebesar 94.500 km², sedangkan luas hutan mangrove 30.497,71 Ha, luas terumbu karang 6.492,1 Ha dan padang lamun 11.179,02 Ha serta memiliki berbagai jenis ikan pelagis, udang, rajungan, dan lainnya. Kalimantan Tengah juga memiliki potensi perikanan perairan umum dengan luas \pm 2,29 juta yang terdiri dari 11 sungai besar dengan 33 sungai kecil yang bermula dari utara dan mengalir ke Laut Jawa, Sungai Barito merupakan salah satu sungai terpanjang di Kalimantan Tengah dengan panjang mencapai 900 km dengan kedalaman berkisar 6 sampai 14 meter, hal ini merupakan salah satu potensi untuk pengembangan usaha perikanan darat baik sebagai daerah penangkapan ikan sungai juga untuk budidaya ikan khususnya budidaya keramba maupun jaring apung. Selain itu Kalimantan Tengah memiliki 26 rawa dan 555 danau yang juga merupakan sebagai daerah penangkapan ikan air tawar serta sebagai kawasan budidaya ikan yang tersebar hampir di sebagian besar kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Tengah.

Dengan potensi yang ada jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah (pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan) sampai dengan 2019 sebanyak 62.739 RTP, dengan rincian pembudidaya ikan 26.707 RTP, Nelayan 33.797 RTP dan pengolah Hasil Perikanan 2.234 RTP. Dengan jumlah pelaku usaha tersebut total produksi perikanan yang dihasilkan pada tahun 2019 sebanyak 257.489,83 ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap 149.725,38 ton produksi perikanan budidaya sebesar 101.857,32 ton dan produksi olahan perikanan sebesar 6.396,13 ton.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan dibentuk mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kalimantan Tengah meliputi: a). perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 Gross Tonnage (GT), penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; b). pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 Gross Tonnage (GT), penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; c). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan

di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 Gross Tonnage (GT); d). pelaksanaan administrasi dinas; dan e). pelaksanaan tugas lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD maupun pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan melalui Renstra dan Renja SKPD strategi program yang dilaksanakan pada tahun 2016-2020 meliputi: 1). Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap; 2). Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya; 3). Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan; 4). Program Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir; dan 5). Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber daya manusia, untuk pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sampai akhir tahun 2019 berjumlah 153 orang yang terdiri dari: PNS berjumlah 99 orang dan Tenaga Kontrak berjumlah 54 orang.

II. TARGET DAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2016-2020 telah menetapkan target kinerja pembangunan yang terukur dan rasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019 serta target dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Indikator kinerja pembangunan tersebut seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Dalam RPJMD 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja RPJMD 2016-2020				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi Perikanan (ton/tahun)	205.641,77	216.091,36	228.352,39	242.022,41	256.633,21
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)	130.787,3	130.918,1	131.049,0	131.180,1	131.311,21
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	74.854,47	85.173,26	97.276,39	110.842,40	125.322,0
4	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,90	105,45	105,90	106,26	107,00
5	Angka Konsumsi Ikan/ Kap/Tahun	47,09	47,59	48,10	48,61	49,12
6	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	75	78	80	85	87
7	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (kasus)	4	4	4	5	5
8	Jumlah Luasan Konservasi perairan (Ha/tahun)	171.701	171.716	171.741	171.781	171.781
9	Luasan Kawasan Pesisir yang direhabilitasi (Ha/Thn)	5	7,5	10	10	15

Tabel 2. Target Indikator Kinerja yang ditetapkan pada Renstra dan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan 2016-2020

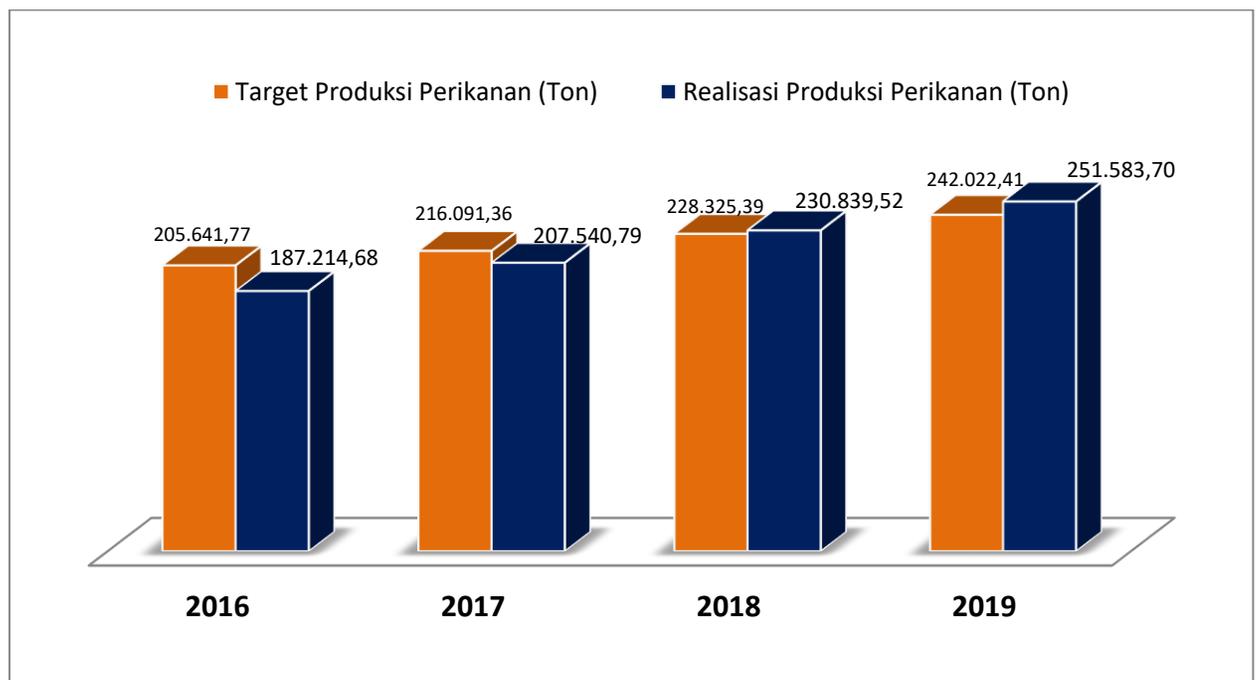
No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja Dinas 2016-2020				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dokumen kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut (dokumen) terdiri dari :					
	a. Dokumen awal RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah	1				
	b. Dokumen antara RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah		1			
	c. Dokumen Akhir RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah			1		
	d. Dokumen Perda RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah				1	
	e. Dokumen kajian biologi, sosial ekonomi di kawasan konservasi					Dalam Proses
2.	Jumlah Pelimpahan Pelabuhan Perikanan dari kabupaten ke provinsi		2	2	5	7
3.	Sertifikasi Tanah Nelayan dan Pembudidaya (persil/tahun)	0	222	0	172	186
4.	Jumlah Nelayan (RTP dan orang)	22.250	22.750	23.300	23.900	24.650
5.	Jumlah Pembudidaya (RTP dan orang)	19.560	20.105	21.200	22.240	23.430
6.	Jumlah Pengolah Hasil Perikanan (RTP dan orang)	2.100	2.140	2.175	2.200	2.250
7.	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (Kelompok	22	25	30	40	50

1. Produksi Perikanan Kalimantan Tengah 2016-2019

Produksi perikanan Kalimantan Tengah baik dari usaha penangkapan ikan dan usaha budidaya ikan sejak tahun 2016 terus mengalami peningkatan dimana pada akhir tahun 2019 produksi perikanan menjadi 251.583,70 ton terjadi peningkatan sebesar 64.369,02 ton atau sebesar 21,24 %. Dari jumlah keseluruhan produksi perikanan Kalimantan Tengah selama periode 2016-2019 produksi perikanan tangkap masih memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 57,70%, sedangkan produksi perikanan budidaya memberi kontribusi sebesar 42,30%. Sedangkan untuk laju pertumbuhan produksi perikanan Kalimantan Tengah selama tahun 2016-2019 sebesar 7,42 % per tahun.

Dibandingkan dengan target RPJMD, persentase capaian produksi perikanan pada 2 (dua) tahun terakhir telah melampaui target yang ditetapkan, pada tahun 2018 persentase capaian sebesar 101,10% dan pada tahun 2019 persentase capaian lebih meningkat yaitu sebesar 103,95%. Belum tercapainya target produksi perikanan pada tahun 2016 dan 2017 karena capaian produksi perikanan tangkap masih di bawah target yang ditetapkan hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dimana nelayan kecil di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah umumnya menggunakan alat tangkap lampara yang merupakan salah satu spesifikasinya termasuk dalam dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 sehingga mengganggu operasional penangkapan nelayan.

Secara rinci perbandingan target dan capaian produksi selama tahun 2016-2019 seperti gambar grafik di bawah.



Grafik 1. Jumlah Produksi Perikanan Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019

Sampai tahun 2019 produsen perikanan di Kalimantan Tengah secara keseluruhan (perikanan budidaya dan tangkap) Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan kontribusi tertinggi sebesar 14,02% di urutan kedua Kabupaten Kapuas dengan kontribusi sebesar 13,88 % dan Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada urutan ketiga dengan kontribusi sebesar 13,81%

Tabel 3. Sebaran Produksi Perikanan menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016-2019

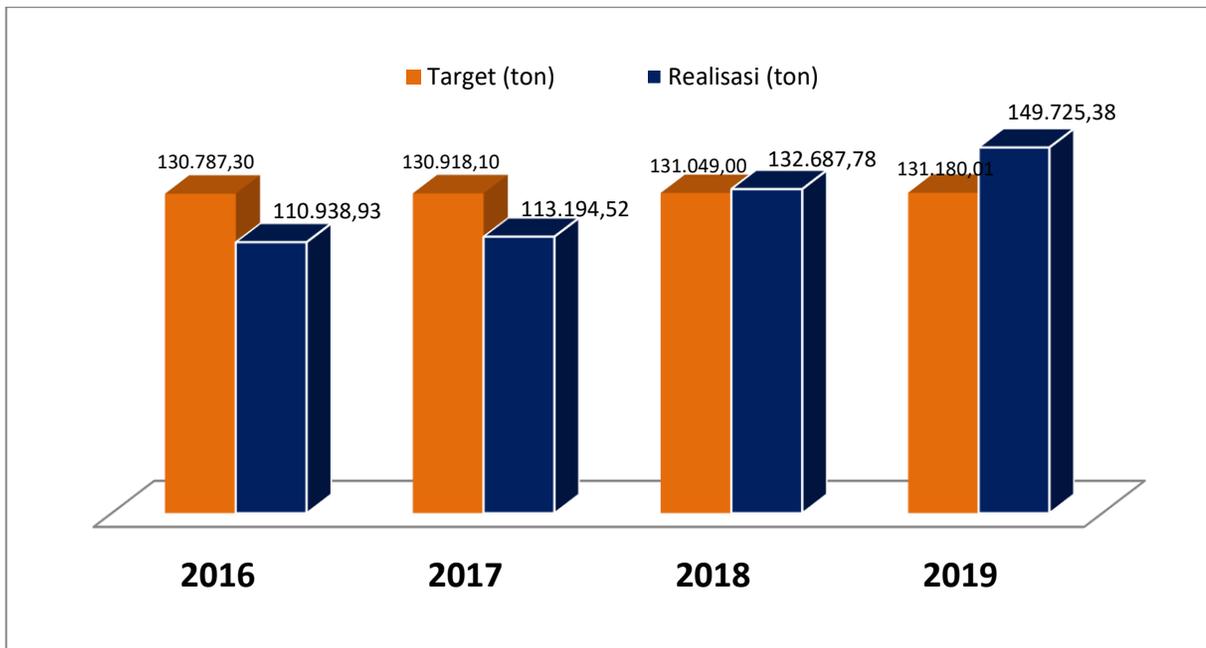
Satuan (ton)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Per Tahun				Rangking
		2016	2017	2018	2019	
1	Barito Selatan	11.131,41	18.822,90	10.448,61	13.660,88	8
2	Barito Timur	2.279,30	1.096,80	8.093,18	2.694,90	12
3	Barito Utara	5.238,20	8.394,77	11.858,55	11.978,56	9
4	Gunung Mas	3.579,65	260,60	9.137,50	5.634,37	11
5	Kapuas	38.627,91	39.397,44	35.515,41	34.927,71	2
6	Katingan	6.152,26	3.728,79	21.151,36	25.250,24	5
7	Kotawaringin Barat	19.946,72	21.991,44	26.741,07	35.267,98	1
8	Kotawaringin Timur	20.206,37	32.094,27	24.020,79	34.739,15	3
9	Lamandau	2.898,68	1.025,60	6.786,05	2.487,53	13
10	Murung Raya	2.310,37	264,64	4.006,89	2.385,54	14
11	Pulang Pisau	23.058,02	23.356,53	20.821,51	23.417,35	6
12	Seruyan	34.307,13	31.989,25	24.846,78	29.253,61	4
13	Sukamara	5.136,22	6.343,82	9.004,41	7.081,44	10
14	Palangka Raya	12.342,44	18.773,94	18.407,40	22.804,44	7
	Total	187.214,68	207.540,79	230.839,52	251.583,70	

2. Produksi Perikanan Tangkap 2016-2019

Realisasi capaian produksi perikanan tangkap Kalimantan Tengah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan yang cukup baik. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana pada tahun 2017 jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 113.194,52 ton meningkat pada tahun 2018 menjadi 132.687,78 ton atau meningkat sebesar 17,22% dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 149.725,29 ton atau meningkat sebesar 12,84%. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap selama kurun waktu 4 (empat) tahun rata-rata sebesar 10,70%.

Dibandingkan dengan target dalam RPJMD persentase capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 dan tahun 2017 belum mencapai target yang ditetapkan, penyebabnya adalah implementasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimana Nelayan kecil di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah umumnya menggunakan alat tangkap lampara yang merupakan salah satu spesifikasinya termasuk dalam dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 sehingga mempengaruhi operasi penangkapan terhadap nelayan yang masih menggunakan alat tangkap lampara yang berakibat terhadap produksi perikanan tangkap pada umumnya. Pada tahun 2018 nelayan yang menggunakan alat tangkap lampara telah mengganti alat tangkapnya dengan alat tangkap yang tidak dilarang seperti *Gillnet* sehingga aktifitas penangkapan ikan oleh nelayan telah berjalan normal, sehingga terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap yang cukup baik pada 2 (dua) tahun terakhir dan target produksi perikanan tangkap yang ditetapkan dapat dicapai, seperti pada tahun 2018 persentase capaian 101,25%, tahun 2019 persentase capaian jauh lebih tinggi yaitu sebesar 114,14%. Secara rinci target dan capaian produksi perikanan tangkap tahun 2016-2019 seperti gambar grafik di bawah.



Grafik 2. Capaian Produksi Perikanan Tangkap Periode Tahun 2016-2019

Sebaran produsen perikanan tangkap Kalimantan Tengah pada tahun 2019 Kabupaten Kotawaringin Timur memberi kontribusi terbesar 18,77%, disusul Kabupaten Kotawaringin Barat 17,63% dan Kabupaten Katingan 15,25% dari total produksi. Dari total produksi perikanan tangkap jenis ikan yang mendominasi untuk penangkapan di perairan laut meliputi Tenggiri (*Scomberomorini*), Manyung (*Arius thalassinus*), Senangin (*Eleutheromena tetradactylum*), Bawal (*Bramidae*), Kakap (*Lutjanidae*). Sedangkan untuk penangkapan di perairan umum jenis ikan yang mendominasi adalah Betok (*Anabas testudineus*), Baung (*Hemibagrus*), Gabus (*Channa striata*), Lais (*Kryptopterus bicirrhis*) dan Tambakan (*Helostoma temminckii*)

Tabel 4. Sebaran Produksi Perikanan Tangkap menurut Kabupaten/Kota, Periode Tahun 2016-2019

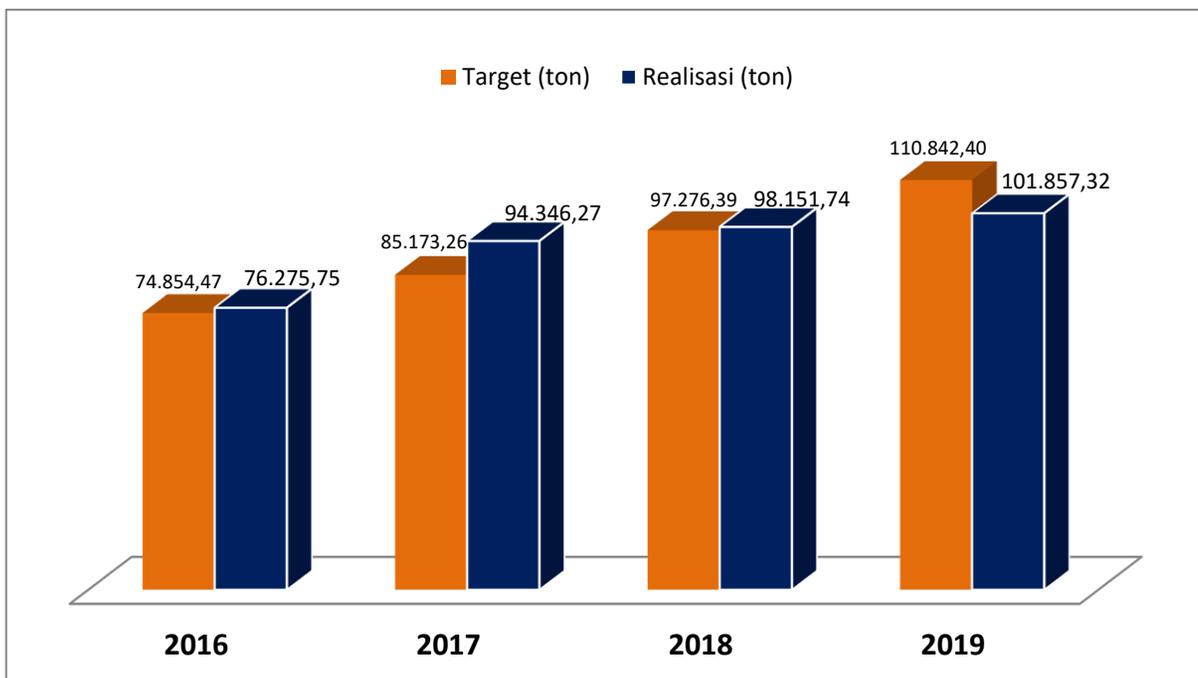
Satuan (ton)

No	Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Tangkap Per Tahun				Rangking
		2016	2017	2018	2019	
1	Kotawaringin Barat	14.792,70	14.470,10	18.301,17	26.400,86	2
2	Kotawaringin Timur	14.688,80	26.107,93	17.444,47	28.106,19	1
3	Kapuas	24.065,88	17.253,00	19.622,05	16.802,65	6
4	Barito Selatan	2.547,80	6.482,00	334,54	2.575,12	10
5	Barito Timur	1.110,30	1.096,80	6.656,32	1.012,65	12
6	Sukamara	3.826,30	4.104,90	7.484,22	4.755,84	8
7	Lamandau	1.119,00	1.025,60	4.495,42	1.253,04	11
8	Seruyan	23.194,35	15.310,91	12.696,07	16.831,72	5
9	Katingan	2.419,90	3.728,79	17.099,24	22.832,59	3
10	Pulang Pisau	19.114,50	19.121,32	16.447,16	19.200,21	4
11	Gunung Mas	352,50	260,60	3.122,52	368,87	13
12	Barito Utara	887,80	851,21	5.923,95	6.014,44	7
13	Murung Raya	207,50	264,64	1.539,91	316,91	14
14	Palangka Raya	2.611,60	3.116,72	1.520,73	3.254,29	9
	Total	110.938,93	113.194,52	132.687,78	149.725,38	

3. Produksi Perikanan Budidaya 2016 -2019

Capaian produksi perikanan budidaya Kalimantan Tengah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan yang cukup baik. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2017 dimana pada tahun 2016 jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 76.275,75 ton meningkat pada tahun 2017 menjadi 94.346,27 ton atau sebesar 23,69%. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya selama kurun waktu 4 (empat) tahun rata-rata sebesar 10,50%.

Dibandingkan dengan target dalam RPJMD persentase capaian produksi perikanan budidaya selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 persentase capaian lebih tinggi dari target ditetapkan. Tahun 2016 persentase capaian terhadap target sebesar 101,90%, tahun 2017 persentase capaian jauh lebih tinggi yaitu sebesar 110,77% dan pada tahun 2018 persentase capaiannya sebesar 100,90%, namun pada tahun 2019 persentase capaian terhadap target RPJMD hanya sebesar 91,89%, tidak tercapai target yang ditetapkan pada tahun 2019 disebabkan oleh faktor teknis seperti perubahan cuaca (hujan) yang tidak dapat diprediksi, dimana waktu penebaran benih yang dilakukan oleh pembudidaya kurang tepat sehingga berdampak pada ketidakstabilan kualitas air yang menyebabkan mortalitas massal pada benih ikan yang ditebar. Selain itu terbatasnya ketersediaan bahan baku pakan ikan mandiri khususnya tepung ikan sebagai komponen utama pakan ikan juga menjadi faktor penyebab pembudidaya produktifitas menjadi kurang maksimal. Namun bila dilihat pertumbuhan produksi bila dibandingkan dengan tahun 2018 pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 3,78%. Secara rinci target dan capaian produksi perikanan budidaya tahun 2016-2019 seperti gambar grafik di bawah.



Grafik 3. Target dan Capaian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016-2019

Sebaran produsen perikanan budidaya Kalimantan Tengah pada tahun 2019 Kabupaten Kapuas memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 19,19%, disusul Kota Palangka Raya 17,79% dan Kabupaten Seruyan 12,20% dari total produksi. Dari jumlah total produksi perikanan budidaya jenis ikan introduksi masih mendominasi seperti ikan patin (*Pangasius pangasius*), Ikan Nila (*Orheochromis niloticus*), Ikan Mas (*Cyprinus Carpio*), Ikan Lele (*Clarias batracus*), Ikan Gurame (*Osphronemus gouramy*) dan Bandeng (*Chanos chanos*).

Tabel 5. Sebaran Produksi Perikanan Budidaya menurut Kabupaten/ Kota, 2016-2019

Satuan (ton)

No	Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya Per Tahun				Rangking
		2016	2017	2018	2019	
1	Barito Selatan	8.583,61	28.449.894	10.114,07	11.085,76	4
2	Barito Timur	1.169,00	-	1.436,87	1.682,25	14
3	Barito Utara	4.350,40	6.242.306	5.934,60	5.964,12	7
4	Gunung Mas	3.227,15	-	6.014,98	5.265,50	9
5	Kapuas	14.562,03	18.153,40	15.893,36	18.124,06	1
6	Katingan	3.732,36	-	4.052,12	2.417,65	10
7	Kotawaringin Barat	5.154,02	39.194,66	8.439,90	8.867,12	5
8	Kotawaringin Timur	5.517,57	157.083,85	6.576,31	6.632,96	6
9	Lamandau	1.779,68	-	2.290,63	1.234,49	13
10	Murung Raya	2.102,87	-	2.466,97	2.068,63	12
11	Pulang Pisau	3.943,52	8.561.292	4.374,34	4.217,14	8
12	Seruyan	11.112,78	407.782	12.150,71	12.421,89	3
13	Sukamara	1.309,92	45.789,15	1.520,19	2.325,60	11
14	Palangka Raya	9.730,84	24.776	16.886,67	19.550,15	2
	Total	76.275,75	94.346,27	98.151,74	101.857,32	

4. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

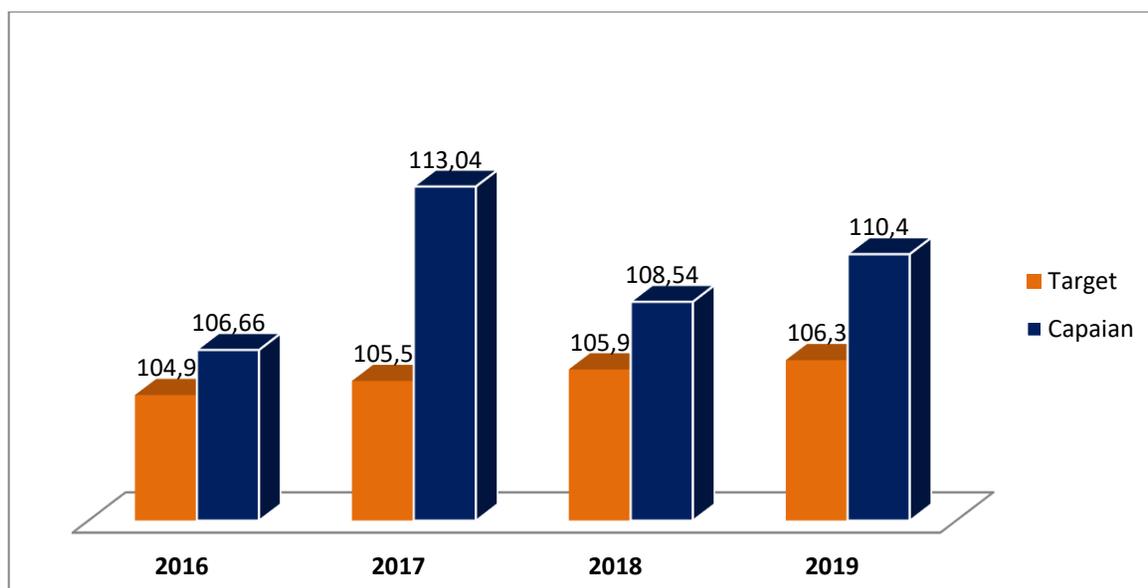
Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah sebagai alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima, dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Jadi, angka ini menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (IT) dan indeks harga yang dibayar nelayan (IB).

Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi merupakan indikator kesejahteraan bagi nelayan. $NTN > 100$ berarti bahwa harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. $NTN = 100$ memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas. $NTN < 100$ berarti bahwa kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kalimantan Tengah selama periode 4 (empat) tahun terakhir (2016-2019) mengalami peningkatan rata-rata per tahun 1,61%. Pada tahun 2016 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kalimantan Tengah meningkat sebesar 106,66 dibandingkan pada tahun sebelumnya hanya 103,84 tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 113,04 atau sebesar 6,08%. Pada tahun 2018 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kalimantan Tengah mengalami penurunan yaitu 108,54 dan meningkat lagi pada akhir tahun 2019 menjadi 110,40 atau naik sebesar 1,71%.

Bila dibandingkan dengan target dalam RPJMD capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kalimantan Tengah selama tahun 2016-2019 persentase capaian selalu melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 persentase capaian terhadap target adalah sebesar 101,68 dan pada tahun 2017 persentase capaian jauh lebih tinggi dari target ditetapkan yaitu sebesar 107,15% serta persentase capaian tahun

2018 menurun menjadi 102,49% meningkat kembali pada tahun 2019 sebesar 103,86%. Secara rinci target dan capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama tahun 2016-2019 seperti gambar grafik di bawah ini.



Grafik 4. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2016-2019

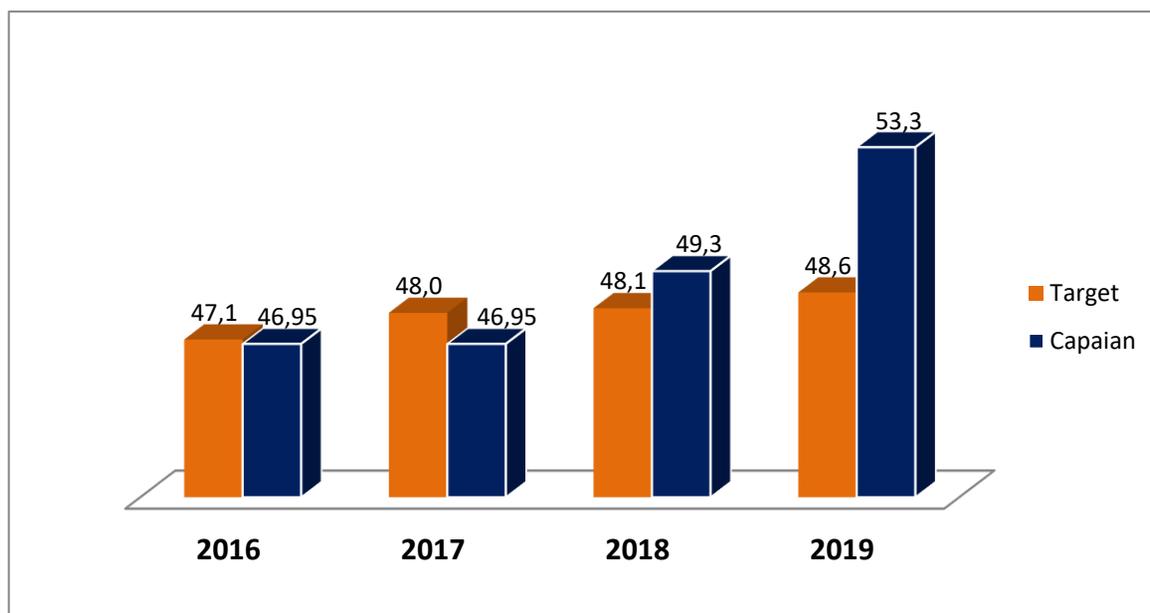
Berdasarkan grafik tersebut di atas, Nilai Tukar Nelayan Kalimantan Tengah pada periode tahun 2016-2019, telah mencapai angka di atas 100 dan dapat disimpulkan bahwa pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus yang berarti tingkat kesejahteraannya cukup baik.

5. Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Masyarakat

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah pada tahun 2016 baru mencapai 46,96 Kg/Kap/Tahun selanjutnya pada tahun 2017 belum terjadi peningkatan masih sebesar 46,95 Kg/Kap/tahun, pada tahun 2018 angka konsumsi ikan masyarakat mengalami peningkatan yang cukup baik menjadi 49,3 Kg/Kap/Tahun, selanjutnya pada tahun 2019 terjadi peningkatan konsumsi ikan yang signifikan menjadi sebesar 53,3 Kg/Kap/Tahun atau meningkat sebesar 7,50% dari tahun 2018. Secara keseluruhan selama periode tahun 2016-2019 peningkatan rata-rata angka konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah sebesar 3,07%. Peningkatan angka konsumsi ikan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan program dan kegiatan Gerakan Gemar Makan Ikan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal lain yang juga memicu meningkatnya konsumsi ikan masyarakat ini adalah seiring terjadinya peningkatan produksi perikanan dan meningkatnya daya beli masyarakat.

Bila dibandingkan target dalam RPJMD dan capaian, angka konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah pada tahun 2016 dan tahun 2017 masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat akan manfaat mengkonsumsi ikan terhadap kesehatan tubuh masih terbatas serta sosialisasi pemerintah juga belum dilakukan secara intens. Pada tahun 2018 seiring dilakukannya program Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN) dan sosialisasi yang masif memberi dampak terhadap capaian angka konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah terutama pada 2 tahun terakhir 2018 dan 2019 telah melampaui target yang ditetapkan, tahun 2018 persentase capaian sebesar 102,49% dan meningkat secara signifikan pada tahun 2019 menjadi 109,65%. Bila dibandingkan dengan rata-rata angka konsumsi ikan nasional, angka konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah pada tahun 2016 lebih tinggi sebesar 6,9%, tahun 2017 lebih tinggi 1%, namun pada tahun 2018 dan tahun 2019 laju konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah lebih rendah dibanding laju rata-rata nasional.

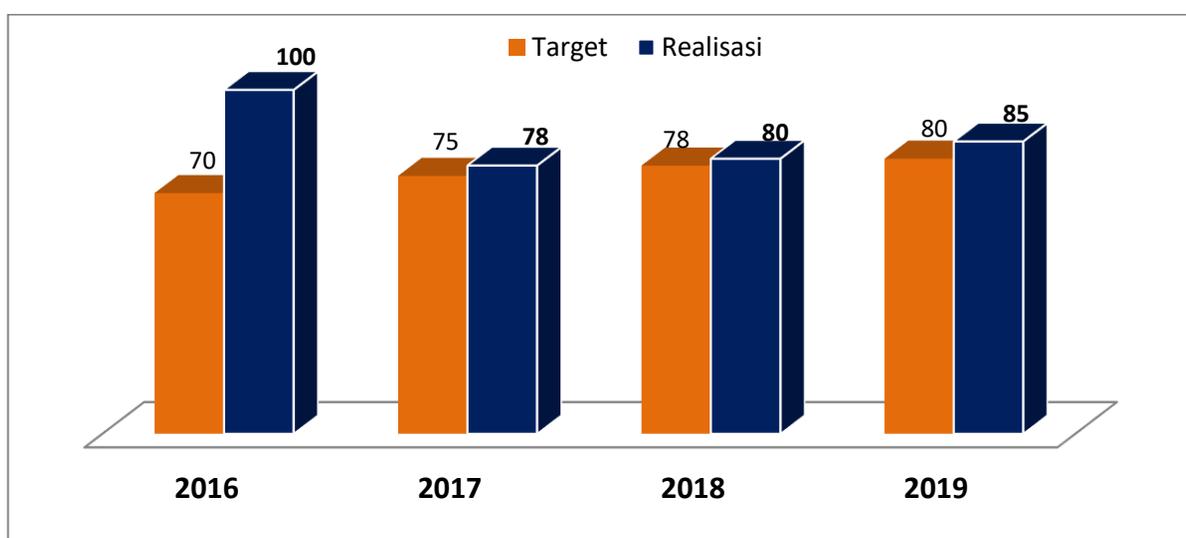
Secara rinci target dan capaian realisasi angka konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah selama tahun 2016-2019 sebagaimana gambar grafik di bawah ini.



Grafik 5. Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Tahun 2016-2019

6. Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (%)

Selama periode tahun 2016-2019 persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kalimantan Tengah terus mengalami perbaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 realisasi capaian persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai 100% jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 70%, tahun 2017 tingkat capaian menjadi 78% namun demikian capaian tersebut masih di atas target yang ditetapkan sebesar 75% dan pada tahun 2018 realisasi capaian menjadi 80% dari target yang ditetapkan sebesar 78%, sedangkan pada tahun 2019 realisasi capaian menjadi 85% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Secara rinci target dan capaian persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama tahun 2016-2019 seperti gambar grafik di bawah ini.

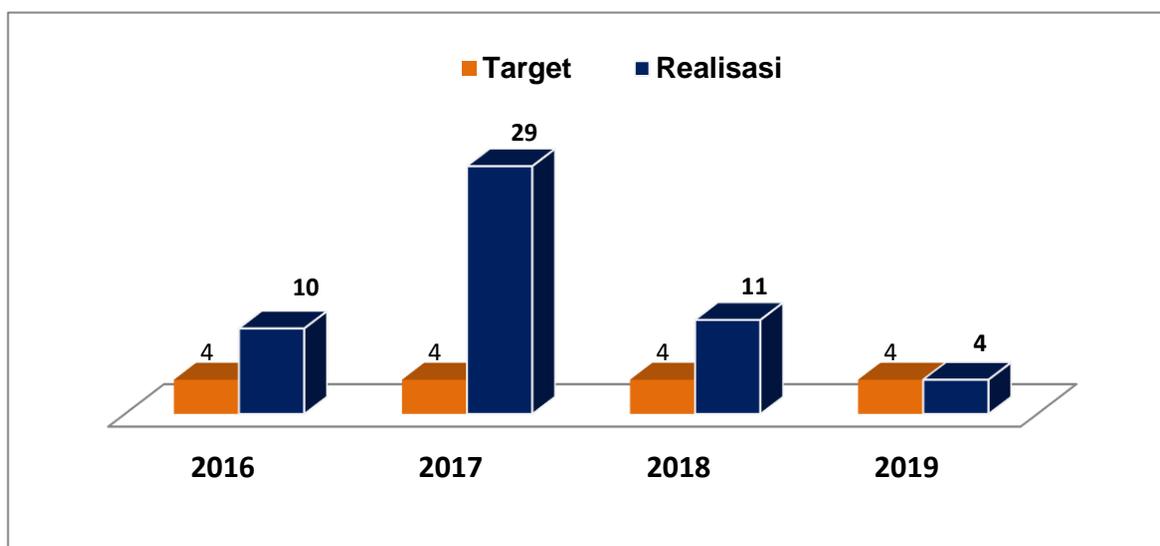


Grafik 6. Perkembangan Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (%) Tahun 2016-2019

7. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (Kasus)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan dan perikanan adalah dengan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perundang-undangan di bidang perikanan. Hambatan aparat penegakkan hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*, disamping jumlahnya sangat terbatas kemampuannya juga masih terbatas.

Selama periode tahun 2016-2019 jumlah penyelesaian kasus tindak pidana kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah sebanyak 54 kasus. Pada tahun 2016 jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan sebanyak 10 kasus, namun pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah kasus Tindak Pidana yang sangat signifikan menjadi 29 kasus, tahun 2018 jumlah kasus dan penyelesaian kasus menurun dari tahun 2017 menjadi 11 kasus. Pada tahun 2019 jumlah penyelesaian kasus tindak pidana kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah menurun kembali menjadi 4 kasus. Bila dibandingkan dengan target dalam RPJMD jumlah kasus yang diselesaikan selama tahun 2016-2019 jauh lebih banyak dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Secara rinci penyelesaian tindak pidana pelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu di Kalimantan Tengah seperti gambar grafik di bawah.



Grafik 7. Jumlah Penyelesaian Tindakan Pidana Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (Kasus) di Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019

Kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang telah diselesaikan di Kalimantan Tengah masih didominasi kasus *Illegal Fishing* baik di perairan laut maupun di perairan umum daratan dengan jumlah kasus 42 kasus atau sebesar 96,30% dan kasus pencemaran perairan sebanyak 2 kasus atau 3,70%. Secara rinci sebaran dan jenis kasus yang telah diselesaikan di Kalimantan Tengah tahun 2016-2019 seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6. Sebaran Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (Kasus) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2019

NO	TAHUN KASUS	LOKASI PELANGGARAN				PENYELESAIAN
		KAB.KOTA	LAUT (kasus)	PUD (kasus)	PENCE MARAN	
1.	2016	Kotawaringin Barat	4	-	-	✓ 1 Kasus P21 Vonis 1 tahun 2 bulan denda Rp. 1.000.000,- ✓ 3 Kasus dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)
		Kotawaringin Timur	1	-	-	Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)
		Seruyan	1	-	-	Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)
		Pulang Pisau	1	-	-	Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)
		Palangka Raya	-	1	-	P21 Vonis 4 tahun 6 bulan denda Rp. 1.000.000,-
		Barito Utara	-	1	-	P21 Vonis 4 bulan denda Rp. 1.000.000,-
		Kapuas	-	1	-	P21 Vonis 5 bulan denda Rp. 500.000,-
2.	2017	Kotawaringin Barat	12	-	-	Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)
		Kotawaringin Timur	3	-	-	Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)
		Seruyan	6	-	-	Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)
		Sukamara	8	-	-	Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)
3.	2018	Kotawaringin Barat	6	-	-	Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)
		Kotawaringin Timur	1	-	1	✓ Kasus dilaut dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan) ✓ Kasus pencemaran sampai penyelidikan penegak hukum
		Seruyan	-	2	1	✓ Kasus di PUD P21 Vonis 1 tahun dan 5 bulan denda Rp. 1.000.000,- dan Rp. 500.000,- ✓ Kasus pencemaran sampai investigasi penegak hukum
4.	2019	Kotawaringin Barat	4	-	-	Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)

8. Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan

Wilayah pesisir dan laut Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi yang cukup besar, potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki meliputi habitat penting pesisir yaitu terumbu karang, padang lamun, alga bentik dan mangrove, sumber daya ikan ekonomis penting, penyu hijau, dugong, lola, kima, teripang. Potensi ekologis antara lain terumbu karang dengan jenis *Acropora* bercabang, *Goniopora*, *Favia*, *Favites*, *Goniastrea*, *Galaxea*, *Fungia*, *Turbinaria*, *Montipora*, *Pectinia*, *Diplostrea* dan pites, filum *Cnidaria* (*Coelenterata*). Padang Lamun (*seagrass*) merupakan satu-satunya tumbuhan air berbunga yang mampu beradaptasi secara penuh di perairan laut yang salinitasnya cukup tinggi, berpembuluh, berdaun, berakar serta berbiak dengan biji dan tunas. Jenis-jenis lamun yang tumbuh di daerah Gosong Senggora *Enhalus acoroides*, *thalassia hemprichii-alophila*, *minor-Cymodocea serrulata-Enhalus acoroides*.

Sumber daya ikan kawasan perairan Senggora Sepagar juga ditemukan jenis ikan-ikan karang, yang di kelompokkan berdasarkan peranannya yaitu ikan ekonomis penting atau ikan konsumsi seperti *Seranidae*, *Lutjanidae*, *Kyphosidae*, *Lethrinidae*,

Acanthuridae, Mulidae, Siganidae, Labridae, Chaetodontidae (kepe-kepe), ikan hias laut (Pomacentridae, Caesionidae, Scaridae, Pomacanthidae, Labridae, Apogonidae, penyu hijau (*Chaelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricate*), Dugong (*Dugong dugon*), teripang (*Holothuria scabra*), lola merah (*Trochus niloticus*), Kima raksasa (*tridacna gigas*).

Semua kekayaan sumber daya yang dimiliki akan segera punah apabila tidak ada upaya perlindungan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan adanya konservasi diantaranya dengan penetapan kawasan konservasi baik perairan laut, pesisir maupun perairan tawar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat konsisten untuk menjaga sumber daya yang ada baik sumber daya ikan maupun sumber daya perairannya agar tidak mengalami kerusakan dan kepunahan hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/543/2018 Tahun 2018 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2019 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Gosong Sanggora, Gosong Sepagar, Gosong Beras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang serta perairan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas keseluruhan 61.362,24 Ha, meliputi 2 area:

Area I Gosong Senggora dan Gosong Sepagar dengan luas 43.257,05 ha terdiri dari:

- Zona Inti dengan luas 591,22 ha
- Zona pemanfaatan dengan luas 1.647,25 ha
- Zona perikanan berkelanjutan dengan luas 40.612,89 ha
- Zona lainnya dengan luas 405,69 ha

Area II Gosong Baras Basah, Teluk bogam sampai Tanjung Keluang dengan luas 18.105,19 ha terdiri atas:

- Zona inti dengan luas 739,48 ha
- Zona pemanfaatan dengan luas 679,02 ha
- Zona perikanan berkelanjutan dengan luas 16.551,15 ha
- Zona lainnya dengan luas 135,54 ha.

Implementasi kegiatan konservasi perairan yang telah dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 dan 2019 telah melakukan transplantasi terumbu karang di kawasan konservasi perairan Sebagai kawasan konservasi perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar, Gosong Beras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang, serta pantai sekitarnya. Jenis terumbu karang yang ditransplantasi adalah *Acropora Formosa* dan *Acropora Formosa*. Transplantasi terumbu karang merupakan upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memperbaiki dan pemulihan ekosistem terumbu karang di Kawasan Konservasi Perairan.

Tabel 7. Transplantasi Terumbu Karang di Kalimantan Tengah

No.	Tahun	Lokasi	Luasan (M2)	Jenis Terumbu karang
1.	2017	Perairan Senggora, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat	30	<i>Acropora Formosa</i> dan <i>Acropora Formosa</i>
2.	2019	Perairan Senggora, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat	70	<i>Acropora Formosa</i> dan <i>Acropora Formosa</i>

Transplantasi terumbu karang merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memulihkan ekosistem terumbu karang agar kondisi lingkungan laut lebih sehat, sehingga dapat memberikan manfaat untuk kepentingan:

a. Pariwisata

Terumbu karang memiliki keanekaragaman jenis biota sangat tinggi dan sangat produktif, dengan bentuk dan warna yang beraneka ragam. Keindahan terumbu karang, kekayaan biologi dan kejernihan air membuat kawasan terumbu karang sangat baik sebagai tempat wisata, *skin diving* atau *snorkeling*, *scuba* dan fotografi.

b. Perikanan Tangkap

Terumbu karang merupakan habitat ikan-ikan karang yang mempunyai harga mahal, sehingga nelayan cenderung menangkap ikan di daerah yang memiliki terumbu karang yang baik.

c. Pelindung Pantai

Terumbu karang juga berfungsi sebagai pelindung pantai, jenis terumbu karang yang merupakan pelindung adalah terumbu karang tepi dan penghalang. Jenis terumbu karang ini berfungsi sebagai pemecah gelombang alami, peredam gelombang dan melindungi pantai dari erosi, banjir dan kerusakan pantai lainnya akibat gelombang.

d. Biodiversitas

Ekosistem terumbu karang mempunyai produktivitas dan keanekaragaman jenis biotanya sangat tinggi. Keanekaragaman makhluk hidup di terumbu karang per unit area dengan hutan hujan tropis.

Secara Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2019-2039, juga telah ditetapkan kawasan konservasi wilayah pesisir dengan luas 49.364,65 hektar. Jumlah luasan kawasan konservasi perairan dan kawasan pesisir di Kalimantan Tengah secara keseluruhan sampai dengan tahun 2020 telah mencapai luas 110.726,89 hektar, bila dibandingkan dengan target dalam RPJMD seluas 171.679 hektar tingkat capaian sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 64,50%. Untuk mengejar target yang ditetapkan pada tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan akan melakukan studi pencadangan kawasan konservasi perairan lainnya.

9. Kawasan Pesisir Yang Direhabilitasi

Ekosistem mangrove di wilayah pesisir memiliki keterkaitan erat terhadap perubahan iklim. Keberadaan mangrove yang sehat di kawasan pesisir dapat meningkatkan resiliensi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim dan meminimalisir dampak bencana alam, seperti tsunami, badai dan gelombang (fungsi adaptasi). Mangrove turut serta dalam mengendalikan perubahan iklim dengan berperan sebagai paru-paru dunia melalui penyerapan dan penyimpanan karbon biru (fungsi mitigasi). Selain berfungsi sebagai pelindung pantai dan 'karbon biru' (*blue carbon*), mangrove merupakan *nursery ground* dan habitat biota yang bernilai ekonomis seperti ikan, kepiting, dan udang (manfaat untuk livelihood). Namun perubahan iklim dan perkembangan global telah memberikan dampak terhadap kelestarian mangrove. Sebagai negara dengan hutan mangrove terluas di dunia, upaya pelestarian mangrove di Indonesia menjadi fokus utama program perubahan iklim dunia.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki panjang garis pantai 703,91 km menghadap laut Jawa, berada di 7 (tujuh) kabupaten pesisir yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten

Sukamara. Luas tutupan hutan mangrove di Provinsi Kalimantan Tengah 30.497,71 ha. Dari jumlah luasan yang ada kondisi hutan mangrove di Kalimantan Tengah dengan katagori baik hanya seluas 2.258,56 ha atau (7,41%) dan sisanya masuk dalam katagori rusak baik berat maupun sedang seluas 28.239,15 ha atau 92,59%. Hutan mangrove yang telah mengalami kerusakan berada di kawasan pesisir pantai penyebab utama adalah karena terjadinya abrasi pantai.

Untuk menekan agar tingkat kerusakan hutan mangrove di Kalimantan Tengah tidak lebih meluas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan berbagai terobosan seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah pesisir akan pentingnya menjaga kawasan hutan mangrove disamping itu juga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng pihak perguruan tinggi dan organisasi yang bergerak dalam penyelamatan lingkungan untuk bersama-sama melakukan dan memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga hutan mangrove. Sedangkan pada wilayah pesisir pantai yang hutan mangrove sudah mengalami kerusakan berat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan rehabilitasi kawasan dengan cara melakukan penanaman mangrove kembali. Dalam kurun waktu tahun 2018-2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan rehabilitasi melalui penanaman bibit mangrove seluas 4 ha dengan jumlah bibit 41.386 pohon dengan jenis *Rhisophora Mucronata*, wilayah pesisir yang telah dilakukan penanaman bibit mangrove pada tahun 2018 meliputi di Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 18.035 pohon dengan luas 2 ha dan pada tahun 2019 dilakukan penanaman bibit mangrove kembali di Desa Ujung Pandaran Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 23.351 pohon dengan luasan ± 2 ha.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD selama tahun 2016-2020 luasan kawasan pesisir Kalimantan Tengah yang direhabilitasi adalah seluas 32,5 hektar, namun tingkat capaian kawasan pesisir yang direhabilitasi baru seluas 4 hektar atau 12,31%, faktor utama yang menyebabkan rendahnya pencapaian target tersebut adalah terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan rehabilitasi (penanaman mangrove). Untuk pencapaian target yang ditetapkan, ke depan Dinas Kelautan dan Perikanan akan melakukan strategi lain dengan cara mengajak pihak-pihak lain untuk peduli menanam mangrove seperti organisasi penyelamat lingkungan, mahasiswa dan *steakholder* yang bergerak dibidang usaha perikanan

Sebagai akselerasi percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah disamping target kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga menetapkan target kinerja strategis Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Renstra SKPD dan Renja SKPD.

1. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut

Kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Kalimantan Tengah adalah penyelesaian penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019, kegiatan penyusunan telah di mulai sejak tahun 2016, rancangan Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039.

Pembagian zonasi pengelolaan perairan laut Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039 adalah seperti tabel 8.

Tabel 8. Zonasi perairan laut Provinsi Kalimantan Tengah

No	Zona	Luas (Ha)	Keterangan
1.	KAWASAN KONSERVASI		
	a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	49.364,65	
	b. Kawasan Konservasi Perairan	61.362,24	
2.	KAWASAN PEMANFAATAN UMUM		
	a. Zona Perikanan Tangkap	813.066,33	
	b. Zona Perikanan Budidaya	8.063,36	
	c. Zona Pelabuhan	274.938,39	
	d. Zona Pariwisata	5.706,82	
3.	ALUR LAUT		
	a. Alur Pelayaran	3.993,66	
	b. Migrasi Biota Laut	3.993,66	
4.	Kawasan Strategis Nasional	6.910,41	

Proses penyusunan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Kalimantan Tengah sebelum menjadi peraturan daerah beberapa dokumen penting harus diselesaikan, yaitu : 1). Dokumen Awal, 2). Dokumen Antara, 3). Dokumen Final, 4). Dokumen KLHS dan 5). Dokumen Kajian Akademis yang menjadi persyaratan mutlak dalam penyusunan perda RZWP3K.

Tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 34 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 34 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sekaligus menjadi payung hukum dalam pembangunan dan pengembangan website Geoportal Laut Berkah, Geoportal merupakan produk inovasi daerah yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019-2039, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 34 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar, Gosong Beras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang, serta wilayah pantai sekitarnya di Provinsi Kalimantan Tengah dan telah tersedianya *Website* Geoportal Laut Berkah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka kesempatan bagi para pengusaha dan *stakeholder* kelautan dan perikanan untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan sesuai peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Capain target kinerja kegiatan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut sebanyak 13 dokumen dengan demikian kinerja pada kegiatan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir telah melampau target.

Tabel 9. Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut tahun 2016-2020

No	Dokumen kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut (dokumen)	Capaian Indikator Kinerja Dinas 2016-2020				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	1. Dokumen awal RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah 2. Album peta dasar RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah	2	-	-	-	-
2	1. Dokumen Antara 2. Album peta tematik	-	2	-	-	-
3	1. Dokumen akhir RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah 2. Dokumen final RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah 3. Dokumen KLHS RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah 4. Dokumen kajian akademik RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah 5. Album peta rencana	-	-	5	-	-
4	1. Perda RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah 2. Peta Rencana Pengelolaan RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah 3. Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	3	-
5	Dokumen Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar, Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang, serta perairan sekitarnya	-	-	-	-	1

2. Prasarana Pelabuhan Perikanan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini memiliki 7 (tujuh) unit Pelabuhan Perikanan hasil dari pengalihan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Adapun 7 (tujuh) pelabuhan perikanan tersebut masing-masing: 1). Pelabuhan Perikanan Selat Jeruju di Kabupaten Katingan; 2). Pelabuhan Perikanan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau; 3). Pelabuhan Perikanan Batanjung di Kabupaten Kapuas; 4). Pelabuhan Perikanan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur; 5). Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; 6). Pelabuhan Perikanan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; 7). Pelabuhan Perikanan Jelai di Kabupaten Sukamara.

Dari 7 (tujuh) pelabuhan perikanan hasil pengalihan kewenangan yang dimiliki baru 3 (tiga) pelabuhan perikanan yang fungsional dan beroperasi yaitu Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan, Pelabuhan Perikanan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pelabuhan Perikanan Jelai di Kabupaten Sukamara. Sedangkan 4 (empat) pelabuhan perikanan lainnya masih belum dapat difungsionalkan dengan maksimal karena fasilitas yang dimiliki terutama fasilitas pokok dan fasilitas fungsional masih sangat terbatas.

Sejak dilakukan penyerahan aset pelabuhan perikanan dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat berkomitmen melakukan pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan untuk mendorong percepatan dan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir terutama ekonomi para nelayan. Salah satunya dengan peningkatan kelas Pelabuhan Perikanan Kumai menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:38/KEPMEN-KP/2019 tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai.

Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas areal keseluruhan \pm 2 Ha, selama periode tahun 2016-2019 terus dilakukan pembenahan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana salah satunya adalah peningkatan konstruksi bangunan pelabuhan/dermaga dari semula berkonstruksi kayu kini telah ditingkatkan menjadi konstruksi beton dengan total luas dermaga yang dibangun seluas 2.247,79 m². Kapasitas tambat kapal nelayan juga ditingkatkan dari semula hanya 8 unit kapal dengan akumulasi tonase 60 *Gross Tonnage* dan pada akhir tahun 2019 kapasitas tambat pelabuhan meningkat menjadi 40 unit kapal dengan akumulasi tonase 300 *Gross Tonnage*.

Disamping peningkatan sarana Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai, Untuk menjaga agar mutu ikan hasil tangkapan nelayan yang didaratkan tetap terjaga dengan baik kapasitas *coldstorage* pada Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai juga ditingkatkan dari kapasitas semula 20 ton telah ditingkatkan menjadi 100 ton dan telah dimanfaatkan oleh para nelayan. Sejalan dengan peningkatan sarana dan prasarana pada Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai, pelayanan administratif terhadap keselamatan pelayaran nelayan juga terus ditingkatkan seperti Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal dan Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan

Selain pengembangan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan. Secara rinci kondisi sarana dan prasarana Pelabuhan perikanan di Kalimantan Tengah seperti pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan di Kalimantan Tengah

No	Nama Pelabuhan	Fasilitas Pelabuhan			Lokasi	Keterangan
		Pokok	Fungsional	Penunjang		
1	Pelabuhan Perikanan Kumai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dermaga 2583 M2 2. Pabrik Es Kapasitas 2,5 Ton 3. Coldstorage : <ul style="list-style-type: none"> ➢ ABF (5 Ton) ➢ Ruang Penyimpan (7 Ton) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2. Internet 3. Pengolahan Air 4. Sumber Air 5. Pabrik Es 6. Genset 7. Rumah Genset 8. Daya Listrik 9. SPBN 10. Tangki BMM 11. Docking 12. Slipway 13. Bengkel 14. Gudang Peralatan 15. Tempat Penyimpanan Ikan Segar 16. Cold Storage 17. Kantor Administrasi 18. Kantor Pengawas Perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Balai Pertemuan Nelayan 2) Rumah Dinas Karyawan (Gol.2) 3) Wisma Nelayan 4) MCK 5) Waserda /Toko 6) Koperasi 	Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah Fungsional dan Operasional 2. Status UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
2.	Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dermaga 972 . M2 2. Pabrik Es Kapasitas 900 Ton 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2. Penampung/ Tangki Air 3. Pabrik Es 4. Daya Listrik 5. Tangki BMM 6. Bengkel 7. Cold Storage 8. Kantor Administrasi 9. Kendaraan Inventaris Roda Dua 10. Tempat Parkir 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Balai Pertemuan Nelayan 2) Rumah karyawan 3) Mess Karyawan 4) Tempat Peribadatan 5) Pos Jaga 6) MCK 7) Waserda /Toko 	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Fungsional dan Operasional 2.Status UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

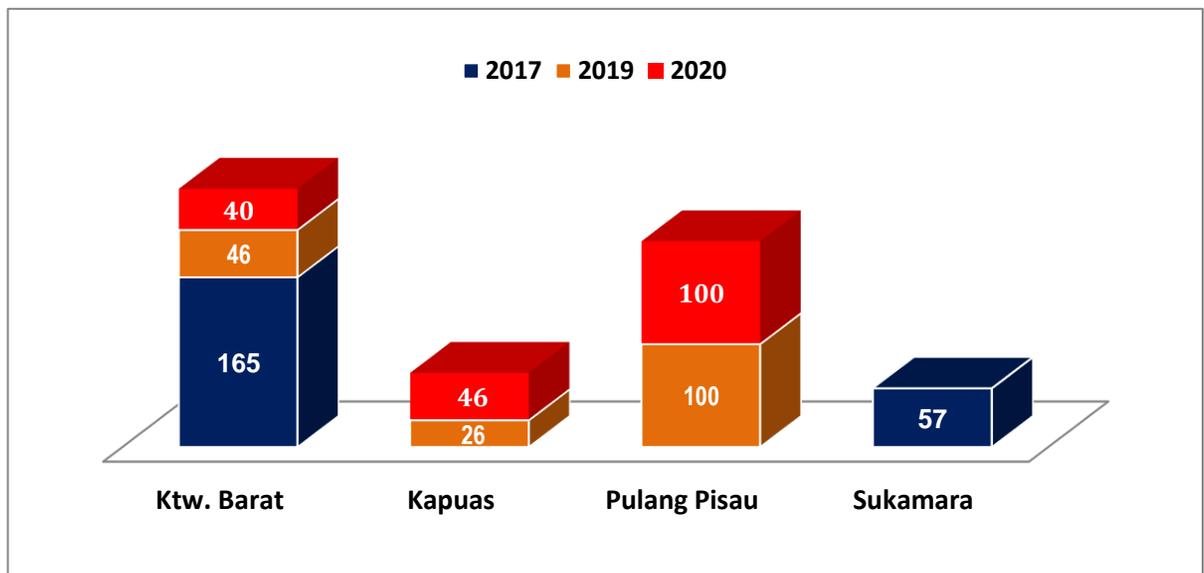
3.	Pelabuhan Perikanan Jelai	1. Dermaga 972 . M2 2. Pabrik Es Kapasitas 900 Ton 3. Jalan Komplek	1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2. Pabrik Es 3. Tangki BBM 4. Daya Listrik 5. Instalasi Gudang 6. Kantor Administrasi Pelabuhan 7. Rumah Genset 8. Genset	1) Balai Pertemuan Nelayan 2) Rumah karyawan 3) Mess Karyawan 4) Pos Jaga 5) Tempat Peribadatan 6) MCK 7) Waserda /Toko	Kecamatan Kuala Jelai Kabupaten Sukamara	1.Fungsional dan beroperasional, namun tidak maksimal, karena terbatas sarana dan prasarana yang dimiliki serta SDM 2.Status hasil Pelimpahan dari Pemerintah kabupaten Sukamara
4.	Pelabuhan Perikanan Batanjung	1. Dermaga 585. M2	1. Areal Daratan Pelabuhan Dermaga 2. Dermaga 3. Jalan	1) Rumah Jaga 2) Tandon Air Bersih 3) MCK 4) Rumah Karyawan	Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas	1.Fungsional dan beroperasional, namun tidak maksimal, karena terbatas sarana dan prasarana yang dimiliki serta SDM 2.Status hasil Pelimpahan dari Pemerintah kabupaten Kapuas
5	Pelabuhan Perikanan Bahaur	Dermaga 315. M2	1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2. Penampung/ Tangki Air 3. Pengolah Air 4. Pabrik Es 5. Rumah Genset 6. Tangki BMM 7. Cold Storage 8. Tempat Penyimpanan Ikan segar 9. Kantor Administrasi Pelabuhan	1) Balai Pertemuan Nelayan 2) Rumah Karyawan 3) Mess Karyawan 4) Pos Jaga 5) Waserda/Toko	Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau	1.Fungsional dan beroperasional, namun tidak maksimal, karena terbatas sarana dan prasarana yang dimiliki serta SDM 2.Status hasil Pelimpahan dari Pemerintah kabupaten Kapuas

6	Pelabuhan Perikanan Selat Jeruju	Dermaga 972 M2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2. Penampung/ Tangki Air 3. Pabrik Es 4. Daya Listrik 5. Tangki BMM 6. Bengkel 7. Gudang Peralatan 8. Tempat Penampungan Ikan 9. Cold Storage 10. Kantor Administrasi 11. Kendaraan Inventaris Roda Dua 12. Tempat Parkir 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Balai Pertemuan Nelayan 2) Rumah Karyawan 3) Mess Karyawan 4) Pos Jaga 5) MCK 	Kecamatan Katingan Kabupaten Katingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsional dan beroperasional, namun tidak maksimal, karena terbatas sarana dan prasarana yang dimiliki serta SDM 2. Status hasil Pelimpahan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas
7	Pelabuhan Perikanan Ujung Pandaran	Dermaga 400 M2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2. Penampung/ Tangki Air 3. Pabrik Es 4. Daya Listrik 5. Tangki BMM 6. Bengkel 7. Gudang Peralatan 8. Cold Storage 9. Kantor Administrasi 10. Kendaraan Inventaris Roda Dua 11. Tempat Parkir 		Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum beroperasional, karena sarana dan prasarana rusak berat 2. Status hasil Pelimpahan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

3. Sertifikat Tanah Nelayan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terus bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat termasuk masyarakat yang berada di kawasan pesisir yang umumnya berprofesi sebagai nelayan serta identik sebagai kantong-kantong kemiskinan. Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan hanya dapat diatasi dengan campur tangan pemerintah pusat dan daerah melalui kebijakan makro pemerintah berupa Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah adalah Program SeHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah) Nelayan.

Program SeHAT Nelayan ini bertujuan memberikan kekuatan hukum atas kepemilikan hak atas tanah bagi nelayan, fasilitasi penyediaan aset yang dapat digunakan sebagai jaminan/agunan untuk memperoleh modal untuk pengembangan usaha, serta meningkatkan kepastian dan keberlangsungan usaha nelayan, dengan demikian melalui program ini akan membantu meningkatkan jaminan akses permodalan bagi nelayan. Sampai dengan tahun 2020 realisasi jumlah nelayan di Kalimantan Tengah yang mendapatkan Program SeHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah) Nelayan sebanyak 580 persil yang tersebar di 4 (empat) kabupaten. Rincian sebaran nelayan menerima program SeHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah) seperti pada gambar grafik di bawah ini.



Grafik 8. Sebaran dan Jumlah Nelayan Penerima Program SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) di Kalimantan Tengah

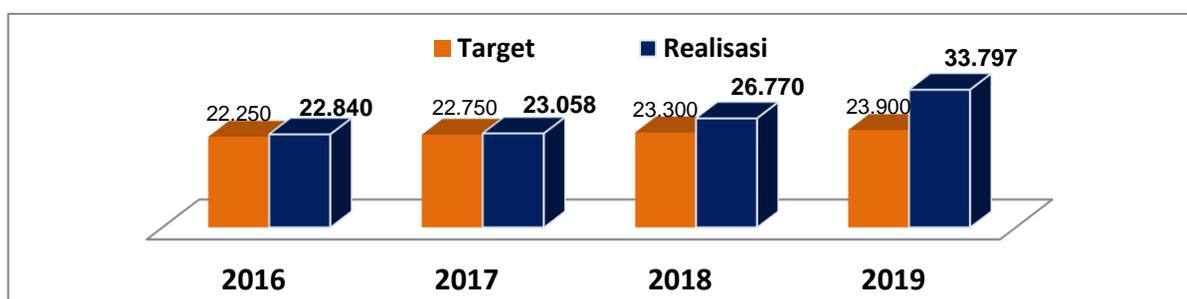
4. Perkembangan Rumah Tangga Perikanan (RTP)

Perkembangan Rumah Tangga Perikanan (RTP) di Kalimantan Tengah selama periode tahun 2016-2019 mengalami pertambahan sebanyak 17.497 RTP sehingga sampai dengan tahun 2019 jumlah RTP (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan) menjadi sebanyak 62.739 RTP. Pada tahun 2017 peningkatan jumlah RTP hanya sebanyak 596 RTP atau meningkat sebesar 1,32%, peningkatan tertinggi jumlah RTP terjadi pada tahun 2018 sebanyak 9.545 RTP atau sebesar 20,82% dan pada tahun 2019 penambahan jumlah RTP hanya 7.357 RTP atau sebesar 13,28%. Sedangkan rata-rata pertambahan RTP di Kalimantan Tengah selama tahun 2016-2019 adalah sebesar 11,81%.

a. Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap

Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual. Kegiatan operasi penangkapan rumah tangga perikanan ini dapat dilakukan oleh rumah tangga tersebut saja, oleh rumah tangga tersebut bersama-sama tenaga buruh saja.

Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap di Kalimantan Tengah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan jumlah dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 14,43%. Pada tahun 2016 jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap sebanyak 22.840 dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 23.058 atau meningkat 0,95% sedangkan pada tahun 2018 pertambahan yang cukup banyak menjadi 22.770 atau meningkat 16,10% serta pada tahun 2019 bertambah kembali menjadi 33.797 atau meningkat sebesar 26,25%. Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap memberi dampak terhadap peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap. Dibandingkan dengan target realisasi selalu lebih tinggi, tahun 2016 realisasi sebesar 102,65%, tahun 2017 sebesar 101,35% dan tahun 2018 realisasi capaian meningkat sebesar 114,89 bahkan pada tahun 2019 tingkat capaian sampai 141,41%. Secara rinci perkembangan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap di Kalimantan Tengah pada 2016-2019 seperti grafik di bawah.



Grafik 9. Perkembangan Jumlah (RTP) Perikanan Tangkap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019

Sebaran Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap di Kalimantan Tengah pada tahun 2019 Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki jumlah terbanyak 4.514 RTP disusul Kabupaten Kotawaringin Barat dengan jumlah 4.376 RTP dan Kabupaten Katingan Selatan sebanyak 3.538 RTP.

Tabel 11. Sebaran Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap menurut Kabupaten/Kota, tahun 2016-2019

Satuan (RTP)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah RTP Tangkap Per Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Kotawaringin Barat	2.369	2.393	2.403	4.376
2	Kotawaringin Timur	2.246	2.269	4.315	4.514
3	Kapuas	1.399	1.403	2.493	2.970
4	Barito Selatan	3.435	3.469	3.571	3.499
5	Barito Timur	598	604	846	1.382
6	Sukamara	1.539	1.554	1.571	1.602
7	Lamandau	199	201	845	2.015
8	Seruyan	1.855	1.873	1.160	1.618
9	Katingan	1.959	1.979	2.002	3.538
10	Pulang Pisau	2.116	2.137	2.467	2.490
11	Gunung Mas	978	988	978	978
12	Barito Utara	1.341	1.354	1.310	846
13	Murung Raya	601	607	601	601
14	Palangka Raya	2.205	2.227	2.208	3.368
	JUMLAH	22.840	23.058	26.770	33.797

b. Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya

Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual dan dihitung dalam satuan unit. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kalimantan Tengah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan jumlah dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 10,31%. Pada tahun 2016 jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya sebanyak 20.268 dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 20.616 atau meningkat 1,72% sedangkan pada tahun 2018 pertambahan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 5.785 menjadi 26.401 atau meningkat sebesar 28,06% serta pada tahun 2019 terjadi pertambahan sebanyak 307 menjadi 26.708 atau meningkat sebesar 1,16%. Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP). Dengan bertambahnya Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya berdampak terhadap peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya. Dibandingkan dengan target realisasi selalu lebih tinggi, tahun 2016 realisasi sebesar 103,62%, tahun 2017 sebesar 102,54% dan tahun 2018 realisasi capaian meningkat sebesar 124,53 serta pada tahun 2019 tingkat capaian 120,09%. Secara rinci perkembangan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kalimantan Tengah pada 2016-2019 seperti grafik, di bawah.



Grafik 10. Perkembangan Jumlah (RTP) Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019

Sebaran Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kalimantan Tengah pada tahun 2019 Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki jumlah terbanyak 3.669 RTP disusul Kabupaten Barito Selatan dengan jumlah 2.896 RTP dan Kabupaten Kapuas sebanyak 2.980 RTP.

Tabel 12. Sebaran Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya menurut Kabupaten/Kota, tahun 2016-2019

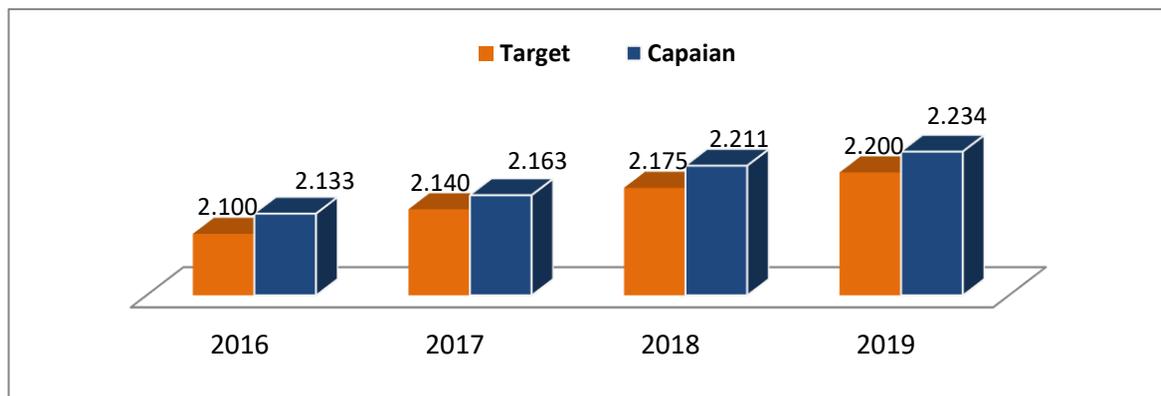
Satuan (RTP)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah RTP Budidaya Per tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Barito Selatan	1.966	1.986	3.769	2.896
2	Barito Timur	1.001	1.011	1.001	1.324
3	Barito Utara	1.203	1.215	1.245	1.245
4	Gunung Mas	675	682	1.370	1.370
5	Kapuas	2.809	2.837	2.809	3.380
6	Katingan	1.075	1.086	1.070	1.234
7	Kotawaringin Barat	2.661	2.683	2.606	3.669
8	Kotawaringin Timur	1.349	1.361	1.335	1.400
9	Lamandau	560	566	742	742
10	Murung Raya	634	640	740	860
11	Pulang Pisau	1.080	1.234	3.103	2.703
12	Seruyan	2.427	2.451	2.722	2.812
13	Sukamara	615	621	668	713
14	Palangka Raya	2.213	2.243	3.221	2.360
	JUMLAH	20.268	20.616	26.401	26.708

c. Rumah Tangga Perikanan (RTP) Pengolahan Hasil Perikanan

Rumah Tangga Perikanan (RTP) Pengolahan Hasil Perikanan adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan pengolahan Hasil ikan/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual dan dihitung dalam satuan unit

Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Pengolahan Hasil Perikanan di Kalimantan Tengah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 1,56%. Pada tahun 2016 jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Pengolahan Hasil Perikanan sebanyak 2.133 dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 2.163 atau meningkat 1,41% sedangkan pada tahun 2018 bertambah menjadi 2.211 atau meningkat sebesar 2,22% serta pada tahun 2019 bertambah menjadi 2.234 atau meningkat sebesar 1,04%. Dibandingkan dengan target realisasi, tahun 2016 realisasi sebesar 101,57%, tahun 2017 sebesar 101,07% dan tahun 2018 realisasi capaian meningkat sebesar 101,66% serta pada tahun 2019 tingkat capaian meningkat sebesar 101,55%. Secara rinci perkembangan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Pengolahan Hasil Perikanan di Kalimantan Tengah pada 2016-2019 seperti grafik, di bawah.



Grafik 11. Perkembangan Jumlah (RTP) Pengolahan Hasil Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019

Sebaran Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Pengolahan Hasil Perikanan di Kalimantan Tengah menyebar di 13 (tiga belas) kabupaten/kota, terdapat 1 (satu) kabupaten yang tidak menyampaikan laporan perkembangan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Pengolahan Hasil Perikanan yaitu Kabupaten Murung Raya karena di kabupaten tersebut untuk pengolahan hasil perikanan selama ini masih berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 13. Sebaran Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Pengolahan Hasil Perikanan menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016-2019

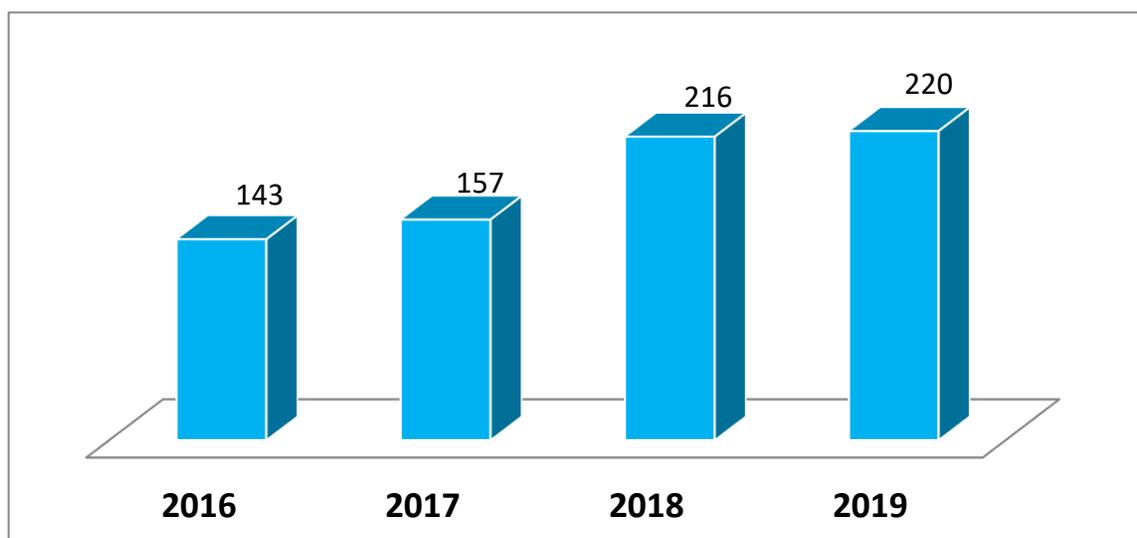
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Pengolahan			
		2016	2017	2018	2019
1.	Barito Selatan	132	143	102	116
2.	Barito Timur	29	25	30	32
3.	Barito Utara	23	153	198	210
4.	Gunung Mas	51	123	154	168
5.	Kapuas	254	250	295	326
6.	Katingan	278	383	250	-
7.	Kotawaringin Barat	174	174	185	255
8.	Kotawaringin Timur	269	269	259	240
9.	Lamandau	59	59	76	76
10.	Murung Raya	-	-	-	-
11.	Pulang Pisau	12	5	9	9
12.	Seruyan	163	123	130	195
13.	Sukamara	383	300	325	402
14.	Palangka Raya	306	156	198	205
	Total	2.133	2.163	2.211	2.234

5. Perkembangan Pokmaswas

Kalimantan Tengah memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup luas dengan panjang garis pantai ± 703,91 km dan potensi laut Kalimantan Tengah sebesar 94.500 km², serta memiliki perairan umum daratan dengan luas ± 2,29 juta. Potensi wilayah ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan penangkapan ikan, budidaya ikan juga dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan, wisata bahari dan lain sebagainya. Untuk menjaga agar potensi ini tetap lestari perlu dikelola dan diawasi secara berkesinambungan sehingga terjaga kelestariannya. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada agar tidak terjadi konflik dan pelanggaran oleh pelaku usaha maupun *stakeholder* baik lokal maupun dari luar, perlu dilakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara terintegrasi antara pengawas perikanan dengan aparat kepolisian, angkatan laut dan masyarakat.

Terbatasnya jumlah aparat pengawas dan sarana prasarana pengawasan yang dimiliki serta luasnya wilayah yang harus diawasi menjadi kendala dalam kegiatan pengawasan. Salah satu strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan mendorong dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pembentukan kelompok-kelompok Masyarakat Pengawas atau (POKMASWAS) bidang kelautan dan perikanan.

Selama periode tahun 2016-2019 capaian jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, selama 4 (empat) tahun terakhir peningkatan jumlah kelompok sebanyak 80 kelompok atau 57,17%, bila di rata-rata peningkatan jumlah kelompok per tahun mencapai 10,04%. Pada tahun 2016 jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) kelautan dan perikanan bertambah 3 kelompok atau meningkat 2,10%, selanjutnya tahun 2017 bertambah kembali sebanyak 14 kelompok atau meningkat 8,92% dan di tahun 2018 terjadi pertambahan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 59 kelompok atau 27,31%. Sedangkan pada tahun 2019 pertambahan jumlah kelompok hanya 4 atau 1,82%. Secara rinci perkembangan jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) kelautan dan perikanan selama tahun 2016-2019 seperti pada grafik di bawah ini.

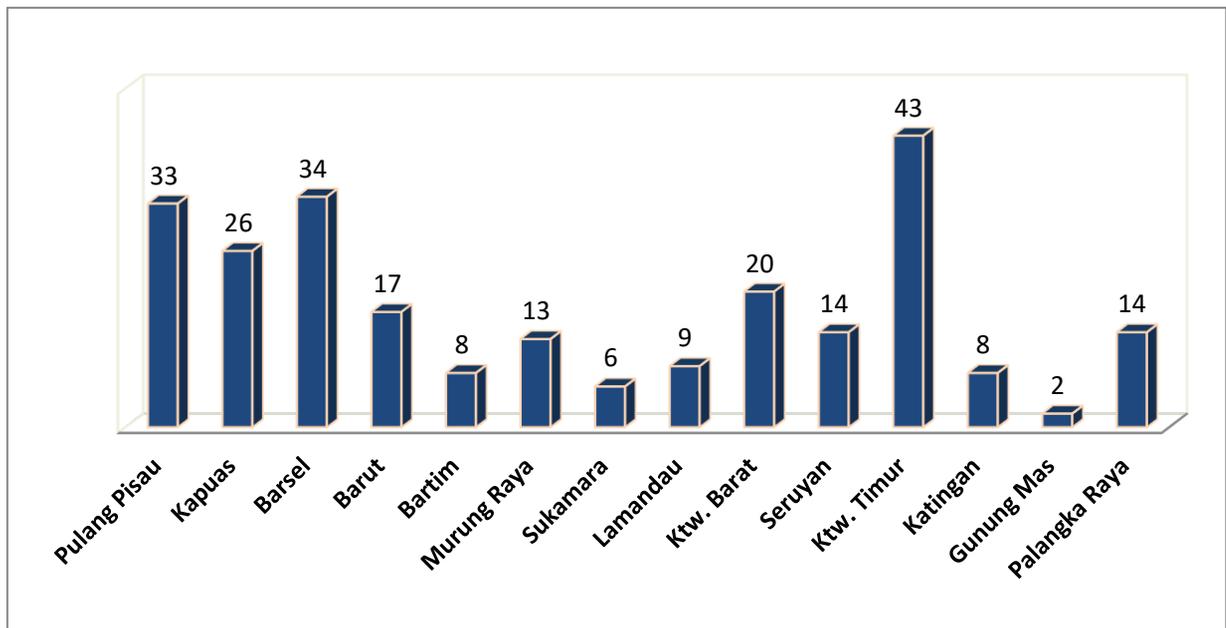


Grafik 12. Perkembangan Jumlah POKMASWAS Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019

Berdasarkan grafik tersebut di atas terlihat bahwa perkembangan jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) kelautan dan perikanan selalu mengalami peningkatan, hal ini sebagai salah satu indikator bahwa kepedulian masyarakat untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan cukup baik.

Disamping itu juga penambahan jumlah POKMASWAS ini sebagai keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan.

Sebaran jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 43 kelompok, selanjutnya Kabupaten Barito Selatan sebanyak 34 kelompok dan di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 33 kelompok. Secara rinci sebaran jumlah POKMASWAS di masing-masing kabupaten/kota seperti pada gambar grafik di bawah.



Grafik 13. Sebaran Jumlah POKMASWAS Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2019

III. INOVASI DAERAH

1. Geoportal Laut Berkah

a. Dasar Hukum

Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan inovasi daerah berupa aplikasi digital Geoportal "Laut Berkah" yang berbasis spasial. Geoportal "Laut Berkah" merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk menjawab tantangan pembangunan kelautan dan perikanan di era digital. Pada era digital menuntut informasi bisa diakses secara lebih cepat melalui *online* dan *mobile*. Geoportal "Laut Berkah" memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang disediakan melalui komputer dan telepon genggam. Geoportal "Laut Berkah" merupakan tindak lanjut dari produk hukum dan petunjuk teknis di bawah ini :

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Geoportal Laut Berkah dikembangkan sebagai amanat ayat (1) pasal 28 peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, berbunyi : Dalam rangka pelayanan informasi dan *data base* perizinan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dibentuk aplikasi Geoportal "Laut Berkah". Dalam ayat (2) pasal 28 menyebutkan bahwa dalam pemberian Pertimbangan Teknis pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pemanfaatan Perairan Perangkat Daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan menggunakan aplikasi Geoportal "Laut Berkah". Dengan demikian Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberian pertimbangan teknis izin lokasi dan izin pemanfaatan perairan Kalimantan Tengah menggunakan aplikasi Geoportal Laut Berkah.

b. Keunggulan Geoportal Laut Berkah

Sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat Geoportal Laut Berkah dikembangkan berbasis spasial untuk izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah Kalimantan Tengah. Dengan basis spasial dalam pemberian izin lebih presisi dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di Provinsi Kalimantan Tengah. Geoportal "Laut Berkah" yang dikembangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keunggulan :

1. Keterbukaan informasi publik secara digital;
2. Proses perizinan lokasi dan pengelolaan perairan Provinsi Kalimantan Tengah bisa diakses *realtime* dan terstandarisasi oleh sistem serta merupakan *data base* perizinan di perairan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Pengajuan perizinan lokasi dan pengelolaan perairan Provinsi Kalimantan Tengah tidak dilakukan secara tatap muka;
4. Memberi kepastian dalam proses perizinan lokasi dan pengelolaan perairan Provinsi Kalimantan Tengah, setiap tahapan perizinan bisa dipantau secara *online*;
5. Geoportal "Laut Berkah" juga menyediakan fasilitas perundang-undangan sektor Kelautan dan Perikanan yang bisa diakses oleh publik;
6. Geoportal "Laut Berkah" juga mempublikasikan berita-berita terbaru terkait kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai sarana untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan izin lokasi dan izin pengelolaan perairan Provinsi Kalimantan Tengah secara daring, aplikasi Geoportal "Laut Berkah" juga telah dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan dalam pemberian izin dengan dikeluarkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang memuat juga Standar Operasi Prosedur dalam pemberian izin lokasi dan izin pemanfaatan perairan di Kalimantan Tengah. Dengan demikian Geoportal Laut Berkah memiliki kekuatan hukum dan secara prosedur telah memiliki landasan operasional dengan diterbitkan Petunjuk Teknis pemberian izin lokasi dan izin pemanfaatan perairan, alamat *website* geoportal laut berkah bisa dikunjungi di <https://geoportal-lautberkah.kalteng.go.id>

2. Asuransi Nelayan Berkah

Asuransi nelayan adalah asuransi yang diperuntukkan khusus seseorang yang berprofesi sebagai nelayan. Asuransi ini merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bagian dari program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Program Asuransi Nelayan ini untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam guna meningkatkan kualitas hidup manusia, tak terkecuali nelayan di seluruh Indonesia. Sasaran dari program ini adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan, termasuk nelayan yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Selama kurun waktu tahun 2016-2019 jumlah nelayan di Kalimantan Tengah yang mendapatkan program Asuransi Nelayan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 16.331 nelayan.

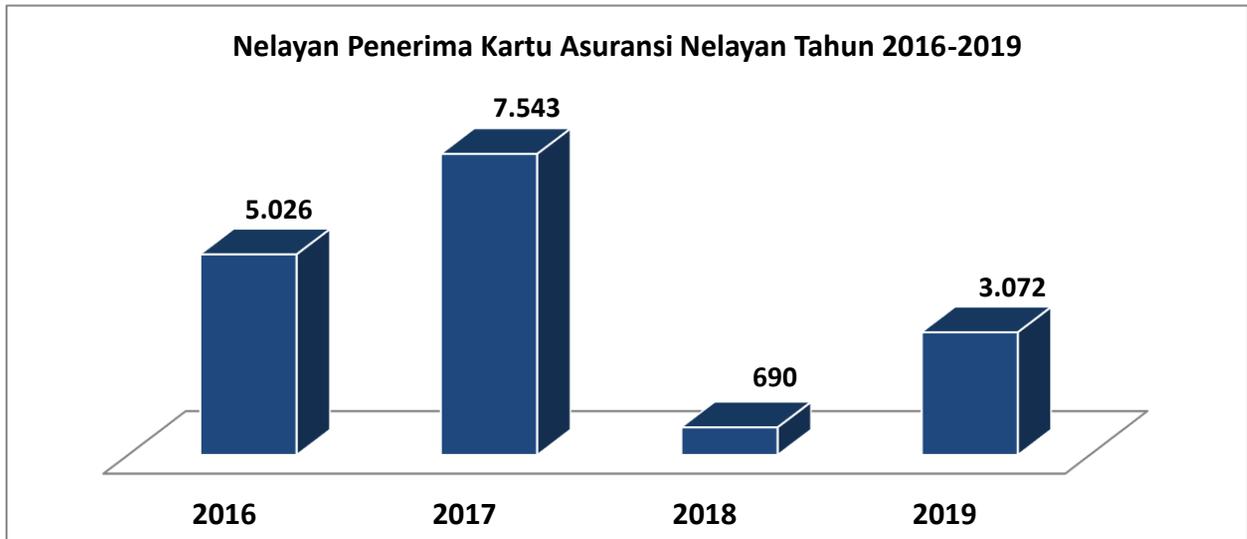
Mengingat program Asuransi Nelayan yang diluncurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai cukup baik untuk memberi perlindungan keselamatan kepada para nelayan dalam melakukan usaha, Pemerintah Kalimantan Tengah berinovasi dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2019, tentang Perlindungan Keselamatan Nelayan. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2019 menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan untuk melindungi keselamatan nelayan Kalimantan Tengah melalui program **Asuransi Nelayan Berkah**.

Dengan dilaksanakannya program Asuransi Nelayan Berkah di Kalimantan Tengah akan dapat memberikan rasa aman dan jaminan perlindungan terhadap resiko yang dihadapi nelayan baik saat melaksanakan aktivitas produksi penangkapan ikan maupun di luar aktivitas penangkapan sehingga nelayan beraktivitas dengan rasa nyaman serta untuk mendorong peningkatan produktivitas hasil perikanan tangkap yang berarti untuk terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan dan keluarganya serta menuju **Kalteng Berkah**. Dengan adanya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Nelayan. Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program Kartu **Asuransi Nelayan Berkah**, akan memberikan jaminan kepada 9.000 orang nelayan se-Kalteng baik nelayan di perairan laut dan perairan umum, dimana santunan nilai manfaat risiko tertanggung yang diberikan ada 2 (dua), yaitu :

- a. Nilai santunan perlindungan kecelakaan akibat aktivitas penangkapan sebagai berikut:
 - Kematian sebesar = Rp100.000.000,-
 - Cacat Tetap sebesar = Rp50.000.000,-
 - Gangguan Kesehatan (biaya pengobatan); sebesar = Rp10.000.000,-
- b. Nilai Santunan Perlindungan Kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan sbb:
 - Kematian akibat kecelakaan sebesar = Rp10.000.000,-
 - Kematian akibat selain kecelakaan sebesar = Rp10.000.000,-

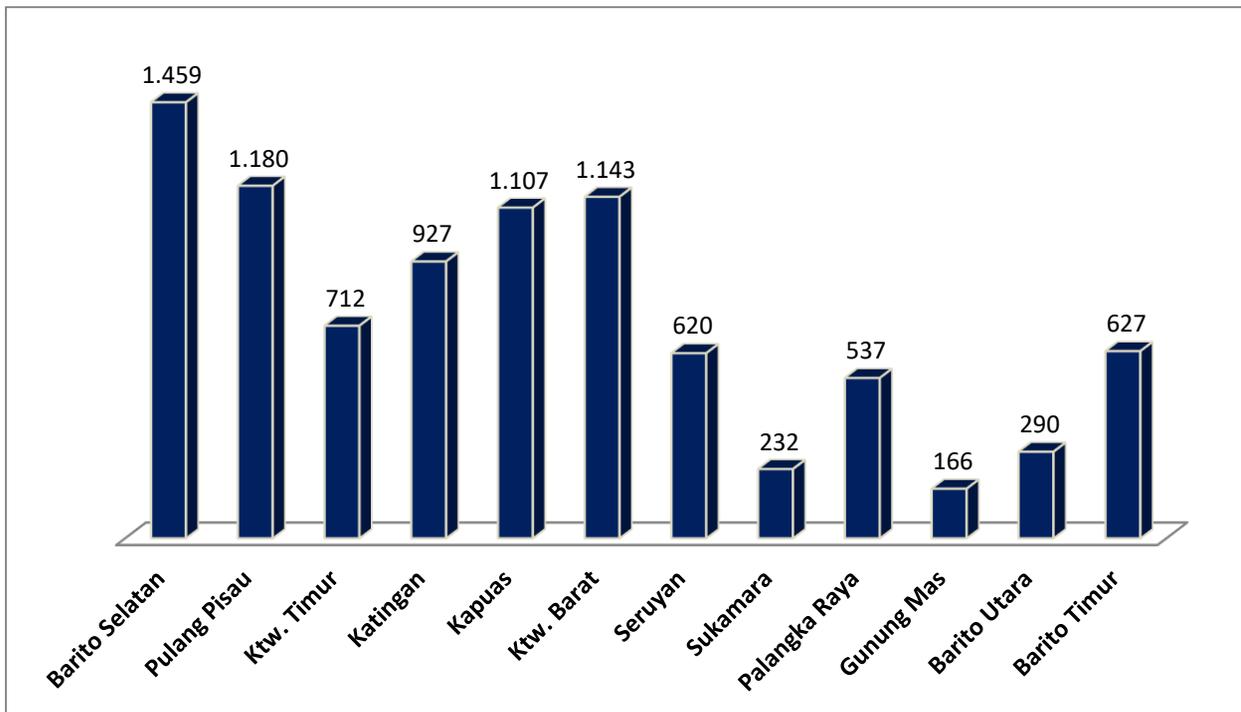
- Cacat Tetap sebesar = Rp50.000.000,-
- Gangguan Kesehatan (biaya pengobatan); sebesar = Rp10.000.000,-

Secara keseluruhan jumlah nelayan di Kalimantan Tengah yang telah menerima Kartu Asuransi Nelayan sebagai jaminan perlindungan keselamatan nelayan selama tahun 2016-2019 sebanyak 16.331 nelayan, secara rinci jumlah nelayan penerima asuransi nelayan selama tahun 2016-2019 di Kalimantan Tengah seperti pada grafik di bawah ini.



Grafik 14. Jumlah Nelayan Penerima Kartu Asuransi Nelayan Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019

Khusus tahun 2020 melalui anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meluncurkan Program Kartu **Asuransi Nelayan Berkah**, akan memberikan jaminan kepada 9.000 orang nelayan di 12 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, sedangkan 2 kabupaten yaitu Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Murung Raya belum menerima program kartu Asuransi Nelayan ini, secara rinci sebaran jumlah kabupaten/kota penerima kartu nelayan selama 2020 seperti grafik di bawah ini.



Grafik 15. Sebaran Jumlah Nelayan Menurut Kabupaten/Kota Penerima Kartu Asuransi Nelayan Selama Tahun 2020

IV. FASILITASI PERIZINAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melakukan perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT), penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Untuk menjalankan fungsi perizinan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi berbagai jenis perizinan usaha bidang kelautan dan perikanan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha yang memerlukan layanan perizinan. Rincian jenis dan persyaratan perizinan yang difasilitasi seperti pada tabel 11 di bawah.

Tabel 14. Jenis Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Jenis Perizinan	Ketentuan/Persyaratan	Keterangan
I.	Izin Bidang Perikanan Tangkap		
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Mengisi Formulir Permohonan Bermaterai dengan dilengkapi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Usaha; ▪ Copy Akte Pendirian Berbadan Hukum ▪ Rekomendasi ketersediaan Sumber Daya Ikan ▪ NPWP Penanggung Jawab Perusahaan ▪ Copy KTP; ▪ Pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar ▪ Surat Keterangan Domisili Usaha ▪ Spesimen tanda tangan ▪ Surat Pernyataan Atas Kebenaran Data dan Informasi yang disampaikan. 	
2.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Mengisi Formulir Permohonan Bermaterai dengan dilengkapi : <ul style="list-style-type: none"> • Copy SIUP; • Copy Grosse Akta/PAS Kapal Ukuran dari 5 GT kurang dar 7 GT; • Rekomendasi Tim Teknis Pemeriksaan Fisik Kapal di Lapangan • Data Kapal sesuai dengan Format • NPWP Pemohon • Copy KTP • Surat Pernyataan dari Pemohon 	

3.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Mengisi Formulir Permohonan Bermaterai dengan dilengkapi : <ul style="list-style-type: none"> • Copy SIUP; • Copy Grosse Akta/PAS Kapal Ukuran dari 5 GT kurang dar 7 GT; • Rekomendasi Tim Teknis Pemeriksaan Fisik Kapal di Lapangan • Data Kapal sesuai dengan Format • NPWP Pemohon • Copy KTP • Surat Pernyataan dari Pemohon; 	
II Izin Bidang Budidaya			
1.	SIUP Pembenihan	<ul style="list-style-type: none"> • tidak menggunakan modal asing • tidak menggunakan teknologi super intensif • lebih dari 0,75 ha • Lokasi pembenihan di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan di luar kewenangan kabupaten/kota 	
2.	SIUP Pembesaran	<ul style="list-style-type: none"> • tidak menggunakan modal asing • tidak menggunakan teknologi super intensif • lebih dari 2 ha. • Lokasi pembesaran di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan diluar kewenangan kabupaten/kota 	
3.	SIUP Pembenihan dan Pembesaran	<ul style="list-style-type: none"> • lebih dari 0,75 ha dan • lebih dari 2 ha. • lokasi pembenihan dan atau pembesaran di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan di luar kewenangan kabupaten/kota 	
4.	SIKPI, untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT untuk setiap orang yang berdomisili di wilayah administrasinya • beroperasi pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi tersebut berkedudukan • tidak menggunakan modal asing 	

III. Bidang Kelautan dan Pesisir			
1.	Izin Lokasi Perairan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengisi permohonan izin lokasi ▪ Persyaratan administrasi Perorangan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Salinan KTP; ➤ Salinan Nomor Pokok Wajib pajak; ▪ Persyaratan administrasi Korporasi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Salinan KTP Penanggungjawab Korporasi; ➤ Profil Perusahaan (akte pendirian dan Surat Keterangan domicili); ➤ Salinan Nomor Pokok Wajib pajak Pimpinan badan usaha. ▪ Persyaratan administrasi Koperasi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Salinan KTP Penanggungjawab Koperasi ➤ Profil Koperasi (akte pendirian, AD/ART, dan Surat Keterangan domicili; dan ➤ Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak 	
2.	Izin Pengelolaan Perairan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengisi permohonan izin lokasi ▪ Persyaratan administrasi Perorangan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Salinan KTP; ➤ Salinan Nomor Pokok Wajib pajak; ▪ Persyaratan administrasi Korporasi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Salinan KTP Penanggungjawab Korporasi; ➤ Profil Perusahaan (akte pendirian dan Surat Keterangan domicili); ➤ Salinan Nomor Pokok Wajib pajak Pimpinan badan usaha. ▪ Persyaratan administrasi Koperasi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Salinan KTP Penanggungjawab Koperasi ➤ Profil Koperasi (akte pendirian, AD/ART, dan Surat Keterangan domicili; dan Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak 	
IV. Bidang Pengolahan Ikan			
1	Izin Usaha Pengolahan Ikan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi;	Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP Bidang Pengolahan Ikan terdiri dari:	
2	Izin Usaha Pengolahan Ikan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;	1. Rencana Usaha Pengolahan Ikan untuk SIUP Bidang Pengolahan Ikan paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> a) jenis usaha; b) sumber dan nilai investasi; c) jenis dan asal Bahan Baku; d) sarana produksi yang digunakan; e) tata letak dan gambaran proses produksi; f) Wilayah pemasaran 	
3	Usaha Pengolahan Ikan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 2. Izin Lokasi 3. Izin Lingkungan 4. Izin mendirikan bangunan 	

V. BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN

Gubernur Kalimantan Tengah berkomitmen dan sangat peduli terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan seperti Nelayan, Pembudidaya Ikan serta Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan. Dalam rangka pemberdayaan Gubernur Kalimantan Tengah selama 4 (empat) tahun terakhir (2016-2019) telah memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan kepada kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan berupa bantuan pembuatan kolam budidaya ikan, bantuan sarana dan prasarana budidaya sistem bioflok, bantuan benih dan pakan ikan, bantuan mesin pakan ikan skala mini, bantuan budidaya keramba ikan, bantuan kelotok lengkap alat penangkapan ikan bagi nelayan perairan umum daratan, bantuan alat tangkap *gillnet* dan alat tangkap jaring cicar untuk nelayan wilayah pesisir, bantuan kapal pengangkut ikan, serta bantuan sarana dan prasarana Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Total Nilai bantuan yang diberikan selama tahun 2016-2019 adalah senilai Rp9.838.521.089,- yang diberikan kepada 84 kelompok usaha perikanan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan diberikannya bantuan sarana dan prasarana dimaksud diharapkan dapat meningkatkan skala usaha yang akhirnya berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan. Secara rinci bantuan yang telah diserahkan selama tahun 2016-2019 seperti tabel, di bawah ini.

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SARANA PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA KELOMPOK
SELAMA PERIODE TAHUN 2016 - 2019**

No.	Nama Paket Bantuan	Volume Paket	Nilai Paket (Rp)	Nama Kelompok Penerima Bantuan	Lokasi penerima (Kab/Kota)	Keterangan
	Tahun 2016					
1	Pembuatan Kolam Budidaya	15 unit	216.000.000	Kelompok Pembudidaya Ikan di kolam pada Kota Palangka Raya, Kab Kapuas dan Kab Barsel	Kota Palangka Raya, Kab. Kapuas, Kab. Barsel	
2	Pengadaan Benih Ikan	22.500 ekor	24.750.800	Kelompok Pembudidaya Ikan di Kota Palangka Raya, Kab Kapuas dan Kab Barsel	Kota Palangka Raya, Kab. Kapuas, Kab. Barsel	
3	Pengadaan paket keramba	15 unit	193.338.000	- Pokdakan Seluluk Jaya	Kab. Kotawaringin Barat	
				- Pokdakan Suka Baru	Kab. Kotawaringin Barat	
4	Pengadaan Kolam Budidaya	15 unit	199.082.000	- Pokdakan Sepan Raya	Kota Palangka Raya	
				- Pokdakan Pasur Kameluh	Kab. Katingan	
				- Pokdakan Mina Makmur	Ka. Barito Selatan	
5	Pengadaan Benih Ikan	69000 ekor	70.020.000	- Pokdakan Seluluk Jaya	Kab. Kotawaringin Barat	
				- Pokdakan Suka Baru	Kab. Kotawaringin Barat	
				- Pokdakan Sepan Raya	Kota Palangka Raya	
				- Pokdakan Pasur Kameluh	Kab. Katingan	
				- Pokdakan Mina Makmur	Kab. Barito Selatan	
6	Pengadaan Mesin Pakan ikan skala mini	6 unit	166.140.000	- Gapoktan Desa Pararapak (1 Unit)	Kab. Barito Selatan	
				- Pokdakan Bersama (1 unit)	Kab. Kotawaringin Timur	

								- Pokdakan Mandiri (1Unit)	Kab.Kotawaringim Timur
								- Pokdakan Mina Tani (1 unit)	Kab.Kotawaringin Barat
								- Pokdakan Balong Abdi (1 unit)	Kab.Kotawaringin Barat
								- Pokdakan Cotoni Makmur (1 unit)	Kab.Kotawaringin Barat
7	Pengadaan Benih Ikan	300.000 ekor	305.625.000					- Pokdakan Anak Kahayan	Kota Palangka Raya
								- Pokdakan Pahandut Seberang Mina	Kota Palangka Raya
								- Pokdakan Bina Lestari	Kota Palangka Raya
								- Pokdakan Berkat Sabar	Kab.Kapuas
								- Pokdakan Gotong Royong	Kab. Kapuas
								- Pokdakan Abi Manap	Kab. Kapuas
								- Pokdakan Mina Sejahtera	Kab. Barito Selatan
								- Pokdakan Sepakat Buntok Kota	Kab.Barito Selatan
								- Pokdakan Sariron	Kab. Gunung Mas
								- Pokdakan Hapakat	Kab. Gunung Mas
								28 Kelompok Penerima	
								JUMLAH TAHUN 2016	
								Tahun 2017	
8	Pengadaan Paket Keramba	20 Unit	140.000.000					Rahmadi (POKDAKAN "BERKAT USAHA"	Jl. Pantai Cemara Lebat I RT.01 RW.I Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota P.Raya
								Herson Tenggara (POKDAKAN "BANGAMAT JAYA")	Kelurahan Sei Gohong Kec. Bukit Batu Kota P. Raya
9	Pengadaan Mesin Pakan Ikan Skala Mini	4 Unit	80.000.000					ARBAINI (Kelompok Sejahtera Bersama)	Jl. Ais Nasution RT.001 Desa Sungai Udang Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan
								ABDUL MUTALIB (Kelompok Mandiri Permai)	Desa Pematang Pnjang Kec.Seruyan Hilir Timur Kab Seruyan

								Desa Derangga Kec Hanau Kab Seruyan	
								Jl. Ais Nasution RT.002, RW.001 Desa Sungai Udang Kec Seruyan Hilir	
10	Pembuatan Kolam Budidaya	20 Unit	120.000.000					Buntok Asam Kecamatan Dusun Selatan	
								Desa Buntoi Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau	
11	Pengadaan Benih Ikan	70.000 ekor	19.200.000					Buntok Asam Kecamatan Dusun Selatan	
								Desa Buntoi Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau	
12	Pengadaan Pakan Ikan	12.000 Kg	36.000.000					Buntok Asam Kec. Dusun Selatan	
								Desa Buntoi Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau	
13	Pengadaan Benih Ikan Jelawat, Baung, dan Betok	1 Paket	68.500.000					Desa Sigi Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau	Pengadaan Benih Ikan Jelawat = 55.000 ekor ; Benih Ikan Baung=12.500 ekor; Pengadaan Benih Ikan Betok 20.000 ekor
14	Pengadaan Paket Keramba	5 Unit	195.015.000					Desa Sigi, Kec Kahayan Hilir Kab Pulang Pisau	
15	Pengadaan Benih Ikan	18.000 Ekor	18.000.000					Desa Sigi, Kec Kahayan Hilir	

16	Pengadaan Pakan Ikan	1.200 Kg	22.200.000	Muriyanto (Kel Maju Bersama Desa Sigi)	Desa Sigi, Kec Kahayan Hilir Kab Pulang Pisau
17	Pengadaan Klotok Lengkap Alat Tangkap	30 Unit	300.000.000	SUKARDI D. ANDUN (Kelompok HANDEP HAPAKAT TALIO)	Kel.Tanjung Pinang, Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya
				KATING (Kelompok SALUJANG MURIK)	Kel.Panamas, Kec.Selatan, Kab Kapuas
				AKHMAD (Kelompok SEHATI)	Desa Lupak Dalam, Kec.Kapuas Kuala, Kab. Kapuas
				HALIL (Kelompok UDANG WINDU)	Kel. Sungai Undang, Kec.Seruyan Hilir, Kab. Seruyan
				SALMAN (Kelompok BUHAN PENARIKAN)	Kel. Kuala Pembuang II, Kec.Seruyan Hilir, Kab. Seruyan
18	Pengadaan Alat Tangkap Gillnet	100 Unit	160.000.000	H. DARMANSYAH (Koperasi PERDANA)	Desa Sungai Damar, Kec.Pantai Lunci, Kab. Sukamara
				UPIK (KUB INDAH PERMAI)	Desa Kiapak, Kec.Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau
				SAMSUNI JAMALUDIN (Koperasi MINA BINA BERSAMA)	Desa Sei Ijum Raya, Kec.Mentaya Hilir Selatan, Kab.Kotim
19	Pengadaan Alat Tangkap Jaring Ciker	24 Unit	600.000.000	SUPI (Kelompok BERKAH BERSAMA)	Desa Sungai Undang, Kec.Seruyan Hilir, Kab.Seruyan

	JUMLAH TAHUN 2017	1.758.915.000	25 Kelompok Penerima		
TAHUN 2018					
20	Pengadaan benih ikan lokal	90.000 Ekor	108.150.000	Di Danau Sigi sebanyak 30.000 ekor Di Danau Pesu sebanyak 30.000 ekor Di DAM Gohong Rawai sebanyak 30.000 ekor	Kab Pulang Pisau Kab Pulang Pisau Kab Gunung Mas
21	Pengadaan bibit mangrove	18.035 Pohon	120.004.500	Syahrian (Kepala Desa Teluk Bogam)	Kab.Kotawaringin Barat
22	Pengadaan Klotok Lengkap Alat Tangkap	24 Unit	185.000.000	Kelompok Mina Bina Bersama sebanyak 3 (tiga) unit Kelompok Kayuh Baimbai sebanyak 6 (enam) unit Kelompok Hinje Atei sebanyak 4 (empat) unit Kelompok Sangalang Hapakat sebanyak 4 (empat) unit Kelompok Sungai Buluh sebanyak 3(tiga) unit Kelompok Mitra Nelayan Sijura sebanyak 2 (dua) unit Kelompok Eka Pakat sebanyak 1 (satu) unit Kelompok Tawun Elai sebanyak 1 (satu) Unit	Kab Kotim Kab.Katingan Kab.Kapuas Kab.Pulang Pisau Kab.Seruyan Kab.Kotawaringin Timur
23	Pengadaan Paket Bioflok Lengkap (Perubahan)	2 Unit	141.090.000	Demplot	Kab.Gunung Mas Kab.Pulang Pisau Kota Palangka Raya

	JUMLAH TAHUN 2018	554.244.500	13 Kelompok Penerima	
	TAHUN 2019			
24	Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumberdaya Ikan - Pengadaan Benih Ikan Lokal	117.890.000	Kepala Desa Sigi Kec.Kahayan Tengah -Pulang Pisau ; Kepala Desa Hanua Kec.Banama Tingang Kab.P.Pisau; Kepala Desa Tumbang Bunut Kec. Rungan - Kab.Gumas	Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas
25	Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil yang berlokasi di Kota Palangka Raya	99.699.340	Kelompok Tampung Parei	Kota Palangka Raya
26	Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil yang berlokasi di Seruyan	99.697.476	Kelompok Usaha Fatimah Mandiri	Seruyan
27	Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil yang berlokasi di Kota Palangka Raya	99.698.673	Mefs Food & Snack	Palangka Raya
28	Pengadaan Kolam Sistem Bioflok Lengkap (terpasang) di Kabupaten Kotawaringin Barat	126.158.000	Yayasan Pondok Pesantren Kotawaringin Barat	Kotawaringin Barat
29	Pengadaan Kolam Sistem Bioflok Lengkap (terpasang) di Kabupaten Barito Timur	127.837.000	Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Ampah	Kab.Barito Timur

30	Pengadaan Kolam Sistem Bioflok Lengkap (terpasang) di Kota Palangka Raya	1 Paket	133.817.000	Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Insan Fii Ta'limiddin; Pondok Pesantren Darul Amin	Palangka Raya	
31	Pengadaan Mesin Pakan Ikan Skala Mini	2 Paket	99.400.000		Seruyan, Kobar, Kotim	
32	Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan	1 Paket	184.100.000	Kelompok Nelayan Maju Bersama Kab. Barito Timur	Bartim	
33	Peningkatan Jalan Produksi Tambak di Kawasan Pesisir dan Laut	1 Paket	199.214.000	Masyarakat Pembudidaya Ikan di Tambak Bengamat Jalur 7	Seruyan	
34	Pengadaan Kelotok Lantai Tinggi Lengkap Alat Tangkap	1 Paket	496.000.000	Kelompok Nelayan Bumbung Talawang Hapakat Kab. P. Pisau; Kelompok Nelayan Tarantang Maju Kab. Kapuas; Kelompok Nelayan Hapakat Mulyo Kab. Pulang Pisau	Kapuas, P. Pisau	
35	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Nelayan Perairan Laut - Pengadaan Alat Tangkap Gillnet 75 Paket	75 Paket	436.500.000	Koperasi Perikanan Tambak Batulat Timur Raya	Seruyan	
36	Pembangunan Sarana dan Prasarana UPR di Kabupaten Kapuas	1 Paket	174.750.000	Pondok Pesantren Babusalam	Kapuas	
37	Pengadaan Benih	2 Paket	159.350.000	Kelompok Budidaya Ikan Mekar Sari	Kotim	Pengadaan Benur Udang Windu dan Benih Ikan

38	Pengadaan Pakan	1 Paket	116.000.000	Kelompok Budidaya Ikan Mekar Abadi Kab.Kotim	Kotim	Pengadaan Benur Udang Windu dan Benih Ikan
39	Pengadaan Pakan	3 Paket	116.000.000	Kelompok Mitra Segintung Raya Kab.Seruyan	Seruyan	Pengadaan Pakan Benih Ikan, Induk Ikan, Pakan Udang)
40	Pengadaan Benih	2 Paket	185.800.000	Kelompok Mitra Segintung Raya Kab.Seruyan	Seruyan	Pengadaan Benih Ikan dan Pengadaan Benur Udang
41	Pengadaan Kolam Budidaya Ikan Sistem Bioflok Lengkap (terpasang) di Kabupaten Kotawaringin Timur	1 Paket	130.388.000	Yayasan Pondok Pesantren Al 'Marhamah -Sampit	Kotawaringin Timur	
42	Bibit Tanaman Magrove Tinggi batang 100 cm, jumlah daun 4 helai di semai dalam polbag ukuran 30 x30 cm	23.351 Pohon	97.950.000	Kepala Desa Ujung Pandaran	Kotawaringin Timur	
		TAHUN 2019	3.200.249.489	18 Kelompok Penerima		
		TOTAL SELAMA TAHUN 2016-2019	6.688.164.789	84 Kelompok Penerima		

DISLUTKAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: dislutkan.kalteng.go.id Email: dislutkan@kalteng.go.id